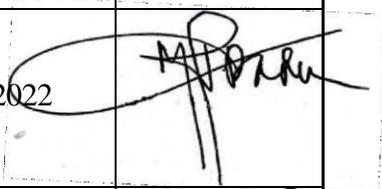
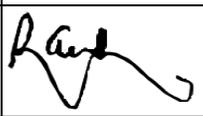




**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disiapkan Oleh:	Muhamad Dasril, S.Sos., MSi	Ketua LPM-PP	18 Oktober 2022	
Diperiksa Oleh	Sudirman, SKM., M.Kes	Wakil Rektor I	18 Oktober 2022	
Disahkan Oleh :	Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M.	REKTOR	18 Oktober 2022	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan telah dapat menyelesaikan salah satu agenda penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu, yaitu pelaksanaan Audit Mutu Internal.

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan tujuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Standar Pendidikan dan mengidentifikasi peluang perbaikan terkait 8 Standar Pendidikan. AMI Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan AMI yang dilaksanakan mulai 26 September–8 Oktober 2022 dengan melibatkan 19 program studi dan 15 Auditor Internal.

Hasil dari AMI ini akan menjadi masukan bagi pimpinan universitas dalam mempertahankan, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pengelolaan sistem pendidikan ke depan. Tentunya, pelaksanaan AMI Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan AMI berikutnya. Atas masukan dan saran dari semua pihak, pimpinan, UPM Fakultas, auditor, dan auditee kami mengucapkan banyak terima kasih.

Palu, 15 Oktober 2022

Ketua LPM-PP



Muhammad Dasril
Muhammad Dasril, S.Sos., M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Audit Mutu Internal	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
BAB 2 RENCANA DAN PELAKSANAAN	3
2.1. Ruang Lingkup AMI.....	3
2.2. Area Audit.....	3
2.3. Tahapan AMI.....	4
2.4. Tim Auditor dan Auditee.....	4
2.5. Jadwal Pelaksanaan Audit	8
BAB 3 HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	10
3.1. Identifikasi Standar Mutu Yang belum tercapai	10
3.2. Rekomendasi Perbaikan Standar Mutu yang belum tercapai	62
BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	103
4.1. Kesimpulan	103
4.2. Rekomendasi.....	103

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016). Universitas Muhammadiyah berkomitmen terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, baik bidang akademik maupun non akademik, melalui sistem pemjaminan mutu internal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 1 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016).

SPMI dilakukan melalui mekanisme siklus proses yang meliputi (Pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016): Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan proses evaluasi dalam SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan (Pasal 5 ayat 2 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016). Hasil AMI menjadi bahan bagi pimpinan unit kerja dan/atau universitas dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu: Pengendalian dan Peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas, AMI yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam upaya memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu. Selain itu, AMI, bermanfaat sebagai berikut:

1. untuk meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan Standar yang telah ditentukan;
2. untuk meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan;
3. untuk memudahkan institusi dalam memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu;
4. untuk menyediakan sarana untuk identifikasi cara kerja yang baik untuk disebarluaskan; dan
5. sebagai sarana yang tepat untuk peningkatan dan pengembangan mutu.

Implementasi SPMI dilakukan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik dan non akademik. Bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan bidang non akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana (Pasal 5 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 ; Pasal 22 ayat 3 PP No. 4 Tahun 2014; Pasal 64 UU No. 12 tahun 2012)

1.2. Tujuan Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Palu dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Memastikan bahwa Standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memastikan bahwa implementasi Standar dikti telah sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
- c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi
- e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum Audit Mutu Internal Muhammadiyah Palu, yaitu:

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti RI No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti)
9. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

BAB 2

RENCANA DAN PELAKSANAAN

2.1 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup Audit Mutu Internal meliputi:

- A. Standar Pendidikan dan Pengajaran
 - 1. Standar Kompetensi Lulusan
 - 2. Standar Isi Pembelajaran
 - 3. Standar Proses Pembelajaran
 - 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 - 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 6. Standar Sarana dan Prasarana
 - 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- B. Standar Penelitian
 - 1. Standar Hasil Penelitian
 - 2. Standar Isi Penelitian
 - 3. Standar Proses Penelitian
 - 4. Standar Penilaian Penelitian
 - 5. Standar Peneliti
 - 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 - 8. Standar Pembiayaan Penelitian
- C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
 - 1. Standar Hasil PKM
 - 2. Standar Isi PKM
 - 3. Standar Proses PKM
 - 4. Standar Pelaksana PKM
 - 5. Standar Pelaksana PKM
 - 6. Standar Saprak PKM
 - 7. Standar Pengelolaan PKM
 - 8. Standar Pembiayaan PKM

2.2 Area Audit

Area Audit adalah semua Program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu, yaitu:

- 1. Magister Hukum
- 2. Magister Manajemen Pendidikan Islam
- 3. Pendidikan Agama Islam (PAI)
- 4. Pendidikan Islam Anak usia ini (PIAUD)
- 5. Hukum Ekonomi Syariah (HES)
- 6. Ahwal Syakhsyah (AS)
- 7. Ilmu Kesehatan Masyarakat
- 8. Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PG-PAUD)
- 9. Pendidikan Non Formal (PNF)

10. Pendidikan Bahasa Inggris
11. Ilmu Keolahragaan (IKOR)
12. Ilmu Administrasi
13. Ilmu Sosiologi
14. Teknik Sipil
15. Teknik Informatika
16. Agribisnis
17. Kehutanan
18. Manajemen
19. Ilmu Hukum

2.3 Tahapan Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal meliputi semua kegiatan yang dilakukan dalam bentuk Audit Dokumen dan Audit Lapangan. Audit Dokumen adalah Audit terhadap kecukupan dokumen-dokumen pendukung pencapaian Standard dan kriteria akreditasi sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen (SPMI) untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan. Audit Lapangan adalah Audit yang dilakukan untuk memeriksa apakah kebijakan2 yang ada dalam dokumen-dokumen Standar tersebut dipenuhi atau tidak dan atau telah dilaksanakan secara tertib dan benar

2.4 Tim Auditor dan Auditee

Pelaksanaan AMI Tahun 2022 menugaskan tim auditor dan auditee sebagaimana disajikan pada Tabel

Daftar Auditee AMI Tahun 2022

No	Nama Auditee	Unit Kerja
(1)	(2)	(3)
1	Fatmah, S.E., M.Pd.	Prodi HES FAI
2	Nirmala Papatungan, S.Pd.I., M.Pd.I.	Prodi PIAUD FAI
3	Abdul Halik, S.Pd.I., M.Pd.I.	Prodi PAI FAI
4	Zakaria, S.Hi., M.H.	Prodi AS FAI
5	Dr. Irmawaty, S.H., M.H	Prodi Magister Hukum
6	Dr. Isnada Waris, M.Pd	Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam
7	Dra Herlina Yusuf, M.Kes	Prodi Ilmu Kesmas
8	Fitriani Ayuningtias, S.H., S.Pd., M.H.	Prodi PNF
9	Syamsidar, S.Pd.I., M.Pd.I.	Prodi PG-PAUD
10	Ismail Manangkari, S.Pd., M.Pd.	Prodi Bahasa Inggris
11	Ardhiansyah Kundupi, S.Pd., M.Pd	Prodi IKOR

12	Andi Famrizal, S.Sos., M.Si	Prodi Ilmu Sosiologi
13	Andi Irwan, S.Sos., M.AP.	Prodi Ilmu Administrasi
14	Arzal M Zain, S.T., M.T	Prodi Teknik Sipil
15	Nursalim, S.Kom., M.Kom.	Prodi Teknik Informatika
16	Tirtha Ayu Paramitha, S.Hut., M.P	Prodi Kehutanan
17	Sofya A Rasyid, S.P., M.P	Prodi Agribisnis
18	Rasmi Nur Anggraeni, S.Ak., M.Ak.Ak.	Prodi Manajemen
19	Moh. Nafri, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum

Daftar Auitor AMI Tahun 2022

No	Nama Auditor	Unit Kerja (Program Studi)
-1	-2	-3
1	Sudirman, SKM., M.Kes	PG-PAUD
		PNF
		IKOR
		Bahasa Inggris
		Magister Manajemen Pendidikan Islam
		Magister Hukum
		Ilmu Hukum
2	Muhamad Dasril, S.Sos., M.Si	PAI
		HES
		KPI
		AS
		Manajemen
		Ilmu Hukum
3	Fikriani A Omolu, S.S., M.Hum., M.Pd	PAI
		HES
		AS
		PIAUD

		Manajemen
		Kehutanan
		Agribisnis
4	Tirtha Ayu Paramitha, S.Hut., M.P	Ilmu Kesmas
		Magister Ilmu Hukum
		Magister Manajemen Pendidikan Islam
		Teknik Sipil
		Teknik Informatika
5	Irmawaty, S.P., M.Si	PG-PAUD
		PNF
		IKOR
		Bahasa Inggris
		Teknik Sipil
		Teknik Informatika
		Manajemen
6	Andi Famrizal, S.Sos., M.Si	PIAUD
		PAI
		HES
		AS
		Manajemen
		Kehutanan
		Agribisnis
7	Nursalim, S.Kom., M.Kom	PG-PAUD
		PNF
		IKOR
		Bahasa Inggris
		Ilmu Hukum

		Ilmu Administrasi
		Ilmu Sosiologi
8	Moh. Nafri, S.H., M.H	Ilmu Kesehatan Masyarakat
		Ilmu Administrasi
		Ilmu Sosiologi
		Magister Pendidikan Islam
		Magister Hukum
		Kehutanan
		Agribisnis
9	Nasrullah, S.E., M.M	PG-PAUD
		PNF
		IKOR
		Bahasa Inggris
		Magister Hukum
		Magister Manajemen Pendidikan Islam
		Ilmu Hukum
10	Rukhayati, S.E., M.M	Ilmu Kesehatan Masyarakat
		Magister Hukum
		Magister Manajemen Pendidikan Islam
		Teknik Sipil
11	Dr. Ir. Rosmaniar Gailea, M.Si	PG-PAUD
		PNF
		IKOR
		Bahasa Inggris
		Ilmu Administrasi
		Ilmu Sosiologi
12	Eka Prasetia Hati Baculu, S.Pd., M.P.H.	PIAUD

		PAI
		HES
		AS
		Manajemen
		Kehutanan
		Agribisnis
13	Sri Haryani, S.E., M.Ak.	PIAUD
		PAI
		HES
		AS
		Ilmu Administrasi
		Ilmu Sosiologi
		Kehutanan
		Agribisnis
14	Andi Mappewali, S.Pd., M.Pd	Ilmu Kesehatan Masyarakat
		Ilmu Administrasi
		Ilmu Sosiologi
		Teknik Informatika
		Teknik Sipil
15	Rahayu Prasetyaningsih, S.Pd., M.Pd.	Ilmu Kesehatan Masyarakat
		Magister Ilmu Pertanian
		Magister Ilmu Hukum
		Magister Manajemen Pendidikan Islam
		Teknik Sipil
		Teknik Informatika

2.5. Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan AMI Tahun 2022 sebagaimana jadwal berikut ini.

Hari	Tanggal	Program Studi
-1	-2	-3
Senin	26 September 2022	PAI
		Bahasa Inggris
		Ilmu Kesehatan Masyarakat
Selasa	27 September 2022	PIAUD
		PG-PAUD
		Ilmu Kesehatan Masyarakat
Rabu	28 September 2022	AS
		PNF
Kamis	29 September 2022	HES
		IKOR
Jumat	30 September 2022	Magister Pendidikan Islam
		Manajemen
		Ilmu Administrasi
Senin	03 Oktober 2022	Magister Pendidikan Islam
		Manajemen
		Ilmu Sosiologi
Selasa	04 Oktober 2022	Magister Hukum
		Ilmu Sosiologi
Rabu	05 Oktober 2022	Ilmu Hukum
		Kehutanan
		Teknik Informatika
Kamis	06 Oktober 2022	Ilmu Hukum
		Agribisnis
		Teknik Sipil
Jumat	07 Oktober 2022	Agribisnis
		Teknik Sipil

BAB 3

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1 Identifikasi Standar Mutu Yang Belum Tercapai

No	Program Studi	Identifikasi Standar Mutu yang Belum Tercapai
(1)	(2)	(3)
1	Pendidikan Anak Usian Dini (PIAUD)	<p>UPPS :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Renstra dan Renop masih disatukan sehingga belum memenuhi ketentuan yang berlaku dimana haruslah terdapat diantara keduanya2. Renstra belum memenuhi kelengkapan legalitas dikarenakan belum terdapat cap pengesahan di Surat Keputusan3. Renop belum memenuhi kelengkapan legalitas dikarenakan belum terdapat cap pengesahan di Surat Keputusan selain itu Dokumen RENOP haruslah belum mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan sehingga salah satu itemnya yaitu pencantuman IKT <p>Penjaminan Mutu :</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu tidak berjalan karena tidak ada struktur Unit Penjaminan Mutu di fakultas. Monitoring dan Evaluasi dilakukan hanya berupa pengawasan langsung dari Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerjasama tetapi tidak ada dokumen terkait kegiatan tersebut. Tidak pernah dilakukan survei kepuasan mahasiswa dan dosen baik untuk proses pembelajaran, sarana dan prasarana maupun layanan akademik sehingga banyak butir-butir audit yang tidak terpenuhi.</p> <p>Standar kompetensi lulusan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program Studi melaksanakan dua kurikulum yakni KKNi dan Kurikulum KKNi OBE. Akan tetapi, kurikulum tidak terdokumentasi di ruang prodi. Kurikulum tersedia dalam bentuk file .pdf saja, belum memiliki kelengkapan lembar pengesahan, belum memuat University Value, belum disusun dengan langkah-langkah yang seharusnya dan belum memuat mata kuliah universitas (MK. Kebencanaan) yang telah disepakati dalam workshop kurikulum di tingkat universitas tahun 2021. Penyusunan kurikulum

		<p>terbaru tidak melibatkan tim ahli dan stakeholder eksternal.</p> <p>2. Rencana Pembelajaran Semester tidak terdokumentasi di ruang prodi, beberapa RPS hanya tersedia dalam belum .pdf. Dosen tidak mengembangkan RPS secara berkala, tidak memperbaruinya setiap semester, dan tidak menyusunnya bersama dengan tim ajar. RPS mata kuliah yang tersedia tidak menggunakan format yang seragam. Dosen tidak mengumpulkan RPS di awal pelaksanaan semester.</p> <p>Standar Isi Pembelajaran : Program Studi telah memiliki dokumen kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU) tetapi tidak ada kegiatan kerjasama yang terdokumentasi/terlaksana (tidak ada laporan kegiatan kerjasama).</p> <p>Standar Proses Pembelajaran Tidak ditemukan adanya kontrak belajar dalam bentuk draf ataupun tertulis, kontrak perkuliahan hanya disampaikan diawal pertemuan perdana setiap mata kuliah, begitu juga dengan kesepakatan penilaian. Jurnal pembelajaran belum terisi seluruhnya masih banyak mata kuliah yang belum terisi jurnal perkuliahan nya dan KHS atau kartu hasil studi belum dapat diakses online</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran Belum ada dokumen dalam evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setiap akhir semester, selama ini evaluasi pembelajaran hanya dilakukan sebatas bertanya kepada mahasiswa namun belum ada hasilnya dalam bentuk dokumen. Selain itu, Dosen-dosen belum sepenuhnya memanfaatkan simak sebagai saran penilaian pembelajaran, sehingga untuk pengarsipan nilai dalam bentuk online belum bisa diketahui oleh prodi.</p> <p>Standar Dosen dan Tendik Hanya ada 4 dosen tetap program Studi. Awal pembukaan prodi berjumlah 6 orang, namun seiring berjalannya prodi 1 dosen diterima CPNS sehingga keluar dari prodi dan 1 nya lagi pindah homebase sehingga tersisanya 4 orang dosen tetap prodi. Selain itu pula terdapat dosen tanpa Jabatan fungsional menjadi penanggung jawab Mata Kuliah. Belum adanya dosen tetap prodi yang tersertifikasi dan kurangnya keaktifan dosen tetap prodi yang menjadi</p>
--	--	--

		<p>anggota asosiasi bidang keilmuan.</p> <p>Standar Saprasi Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar dosen-dosen belum menggunakan SPADA dalam proses perkuliahan, padahal perkuliahan lebih banyak menggunakan online. Dari hasil temuan dijelaskan bahwa dosen-dosen prodi belum sepenuhnya memahami cara pengaplikasian SPADA. Begitu halnya dengan SIMAK belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini disebabkan karena rata-rata mahasiswa belum menyelesaikan admnistrasinya sehingga belum terbuka akses masuk kedalam SIMAK. 2. Dari hasil audit yang telah dilakukan prodi belum memiliki jurnal online yang berlangganan sehingga bahan pustakan berupa artikel, jurnal, prosiding masih sangat kurang bahkan tidak ada. <p>Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>Dari hasil audit yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya Kartu Bimbingan Akademik maupun Skripsi sehingga pembimbingan mahasiswa kepada dosen PA dan Dosen Pembimbing Skripsi tidak terpantau, begitu juga proses pembimbingan akademik yang hanya dilaksanakan 1 kali per semester. Selain itu dalam pengembangan suasana akademik untuk meningkatkan minat mahasiswa belum dibentuk adanya Himpunan Mahasiswa Prodi.</p> <p>Standar Isi Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dosen tetap program studi yang belum memiliki akun Google Scholar dan Sinta. 2. Prodi belum memiliki panduan penelitian. <p>Standar Peneliti</p> <p>UPPS, Program Studi, hingga Dosen tidak memiliki Peta Jalan (Roadmap) penelitian</p> <p>Standar Proses Penelitian</p> <p>belum ditemukan adanya dokumen atau file terkait keterlibatan mahasiswa dalam penelitian sehingga penelitian belum teintegrasi kepada pembelajaran.</p> <p>Standar Peneliti</p> <p>Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen tidak melibatkan mahasiswa, tidak ada dokumentasi keterlibatan mahasiswa, dan program studi tidak memiliki rekaman penelitian DTSP.</p> <p>Saprasi Peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Studi tidak memiliki data jumlah bahan pustaka yang terkait keilmuan prodi karena unit
--	--	---

		<p>perpustakaan tidak memilah data bahan pustaka yang tersedia berdasarkan kelompok bidang ilmu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahan pustaka yang mendukung proses penelitian masih sangat minim yang dibuktikan dengan tidak adanya prosiding, jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi yang menjadi langganan Program Studi. <p>Standar Proses PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Tetap Program Studi tidak dilaksanakan secara melembaga, yakni tidak terdapat surat Tugas dan Surat Keterangan penyelesaian kegiatan dari LPPM dan prodi tidak memiliki dokumentasi laporan kegiatan. <p>Standar Pelaksana PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada dokumen terkait Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat. • Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dosen pengabdi dan terdata dalam BKD tidak menunjukkan keterlibatan mahasiswa. Tidak ada dokumen yang menunjukkan hal tersebut.
2	Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)	<p>UPPS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renstra dan Renop masih disatukan sehingga belum memenuhi ketentuan yang berlaku dimana haruslah terdapat diantara keduanya • Renstra belum memenuhi kelengkapan legalitas dikarenakan belum terdapat cap pengesahan di Surat Keputusan • Renop belum memenuhi kelengkapan legalitas dikarenakan belum terdapat cap pengesahan di Surat Keputusan selain itu Dokumen RENOP haruslah belum mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan sehingga salah satu itemnya yaitu pencantuman IKT <p>Penjaminan Mutu :</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu tidak berjalan karena tidak ada struktur Unit Penjaminan Mutu di fakultas. Monitoring dan Evaluasi dilakukan hanya berupa pengawasan langsung dari Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerjasama tetapi tidak ada dokumen terkait kegiatan tersebut. Tidak pernah dilakukan survei kepuasan mahasiswa dan dosen baik untuk proses pembelajaran, sarana dan prasarana maupun layanan akademik sehingga banyak butir-butir audit yang tidak terpenuhi.</p>

	<p>Standar kompetensi lulusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi melaksanakan dua kurikulum yakni KKNi dan Kurikulum KKNi OBE. Akan tetapi, kurikulum tidak terdokumentasi di ruang prodi. Kurikulum tersedia dalam belum file .pdf saja, belum memiliki kelengkapan lembar pengesahan, belum memuat University Value, Penyusunan kurikulum terbaru tidak melibatkan tim ahli dan stakeholder eksternal. Didalam kurikulum ditemukan adanya perbedaan mata kuliah yang terdapat buku kurikulum dengan yang terjadwal. 2. Dari hasil audit ditemukan sebagian besar dosen belum menyerahkan RPS di awal perkuliahan sehingga Prodi kesulitan melengkapi buku Kurikulum, RPS yang ditemukan tidak sampai setengah dari jumlah mata kuliah yang terdapat didalam kurikulum. Selain itu pula RPS tidak dikembangkan bersama oleh tim ajar dan didalam RPS lengkap belum terdapat adanya instrumen penilaian <p>Standar Isi Pembelajaran :</p> <p>Dari hasil audit yang telah dilakukan belum ditemukan adanya dokumen kerjasama berupa MOU baik nasional maupun Internasional. Adapun MOU yang dimiliki masih MOU antara fakultas dengan Mitra bukan Program Studi dengan mitra.</p> <p>Standar Proses Pembelajaran</p> <p>Tidak ditemukan adanya kontrak belajar dalam bentuk draf ataupun tertulis, kontrak perkuliahan hanya disampaikan diawal pertemuan perdana setiap mata kuliah, begitu juga dengan kesepakatan penilaian. Jurnal pembelajaran belum terisi seluruhnya masih banyak mata kuliah yang belum terisi jurnal perkuliahan nya dan KHS atau kartu hasil studi belum dapat diakses online</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <p>Dari hasil audit yang telah dilakukan belum ada dokumen dalam evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setiap akhir semester, selama ini evaluasi pembelajaran hanya dilakukan sebatas bertanya kepada mahasiswa namun belum ada hasilnya dalam bentuk dokumen. Selain itu, Dosen-dosen belum sepenuhnya memanfaatkan simak sebagai saran penilaian pembelajaran, sehingga untuk pengarsipan nilai dalam bentuk online belum bisa diketahui oleh prodi.</p>
--	---

	<p>Standar Dosen dan Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanya ada 4 dosen tetap program Studi. • Terdapat dosen tanpa Jabatan fungsional menjadi penanggung jawab Mata Kuliah. • Belum adanya dosen tetap prodi yang tersertifikasi • kurangnya keaktifan dosen tetap prodi yang menjadi anggota asosiasi bidang keilmuan <p>Standar Sapraps Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar dosen-dosen belum menggunakan SPADA dalam proses perkuliahan, padahal perkuliahan lebih banyak menggunakan online. • Dosen-dosen prodi belum sepenuhnya memahami cara pengaplikasian SPADA. • SIMAK belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini disebabkan karena rata-rata mahasiswa belum menyelesaikan admnistrasinya sehingga belum terbuka akses masuk kedalam SIMAK. • Prodi belum memiliki jurnal online yang berlanggananan sehingga bahan pustakan berupa artikel, jurnal, prosiding masih sangat kurang bahkan tidak ada. <p>Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ditemukan adanya Kartu Bimbingan Akademik maupun Skripsi sehingga pembimbingan mahasiswa kepada dosen PA dan Dosen Pembimbing Skripsi tidak terpantau, begitu juga proses pembimbingan akademik yang hanya dilaksanakan 1 kali per semester. • Dalam pengembangan suasana akademik untuk meningkatkan minat mahasiswa belum dibentuk adanya Himpunan Mahasiswa Prodi. <p>Standar Isi Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • terdapat dosen tetap program studi yang belum memiliki akun Google Scholar dan Sinta. • Prodi belum memiliki panduan penelitian sehingga dosen tetap prodi belum memiliki roadmap penelitian. <p>Standar Proses Penelitian</p> <p>Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen tidak melibatkan mahasiswa, tidak ada dokumentasi keterlibatan mahasiswa, dan program studi tidak memiliki rekaman penelitian DTSPS.</p> <p>Standar Peneliti</p> <p>Program studi belum memiliki roadmap penelitian prodi, begitu pula dengan dosen tetap prodi yang sesuai dengan bidang keilmuannya.</p>
--	---

		<p>Sapras Penelitian Rujukan pustaka masih sangat minim, rata-rata dosen tetap prodi mengambil bahan kajian hanya dari buku yang tahunnya juga sudah begitu lama</p> <p>Standar Proses PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • PkM yang dilaksanakan dosen belum melembaga, • belum memiliki output dan belum ada review ataupun monev terkait PKM yang dilaksanakan. • masih kurangnya minat dosen tetap prodi melaksanakan PKM. <p>Standar Pelaksana PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada ditemukan dosen tetap prodi yang memiliki Roadmap PkM. • Belum ada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dosen-dosen.
3	Hukum Ekonomi Syariah (HES)	<p>UPPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra dan Renop masih disatukan sehingga belum memenuhi ketentuan yang berlaku dimana haruslah terdapat diantara keduanya 2. Renstra belum memenuhi kelengkapan legalitas dikarenakan belum terdapat cap pengesahan di Surat Keputusan 3. Renop belum memenuhi kelengkapan legalitas dikarenakan belum terdapat cap pengesahan di Surat Keputusan selain itu Dokumen RENOP haruslah belum mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan sehingga salah satu itemnya yaitu pencantuman IKT <p>Penjaminan Mutu : Sistem Penjaminan Mutu tidak berjalan karena Tidak ada personal pelaksana, tidak ada siklus PPEPP yang terdokumentasi, termasuk Monitoring dan Evaluasi tidak berjalan dengan baik.. Monitoring dan Evaluasi dilakukan hanya berupa pengawasan langsung dari Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerjasama tetapi tidak ada dokumen terkait kegiatan tersebut.</p> <p>Standar kompetensi lulusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Studi melaksanakan memiliki Kurikulum KKNi MBKM. namun, kurikulum belum memiliki kelengkapan lembar pengesahan, belum memuat University Value, belum disusun dengan langkah-langkah MBKM-OBE hasil workshop tanggal 15-16 Agustus 2022. • Penyusunan kurikulum terbaru tidak melibatkan tim ahli dan stakeholder eksternal. • RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dimiliki

		<p>pada prodi, namun format yang digunakan tidak seragam dan tidak semua menyerahkan RPS sehingga Prodi kesulitan melengkapi buku Kurikulum utamanya tak dapat mengukur kedalaman dan keluasan bahan kajian berkontribusi mendukung CPL</p> <p>Standar Isi Pembelajaran : Program Studi telah memiliki dokumen kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU) namun, belum ada tindak lanjut kegiatan kerjasama pada dinas dan kantor yang terkait.</p> <p>Standar Proses Pembelajaran Tidak adanya kontrak belajar yang tertulis, dan tidak ada Kartu Bimbingan Akademik maupun Skripsi sehingga tidak terpantau pembimbingan mahasiswa kepada dosen PA dan Dosen Pembimbing Skripsi</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran Mengukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif, (2) otentik, (3) objektif, (4) akuntabel, dan (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi tidak terlaksana.</p> <p>Standar Dosen dan Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari segi kompetensi keilmuan, terdapat 1 DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) HES tidak memenuhi syarat dalam hal kompetensi HES. • Terdapat Dosen Tetap Program Studi yang belum memiliki Jabatan Fungsional dijadwalkan sebagai penanggung jawab mata kuliah. • Masih terdapat dua orang DTSPS masih belum memiliki Jabatan Fungsional. • Sampai saat ini, belum ada dosen yang tersertifikasi profesional. • Kinerja Dosen tidak terpantau di Prodi karena BKD Dosen tidak terdokumentasi dengan baik di ruang prodi. <p>Standar Supras Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh kampus tidak digunakan dengan maksimal, hal ini ditunjukkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Akademik (SIMAK) tidak terisi sehingga KRS dan KHS mahasiswa tidak dapat diakses. • Sistem Pembelajaran Daring (Spada) tidak pernah digunakan karena Prodi tidak menguasai pemanfaatan sistem dan belum ada upaya untuk
--	--	---

		<p>peningkatan hal tersebut.</p> <p>2. Sumber Pustaka yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi masih sangat kecil, tidak terdata dengan baik, tidak ada prosiding, tidak ada koleksi jurnal akreditasi nasional, dan tidak ada koleksi jurnal internasional bereputasi.</p> <p>Standar Peneliti Tidak ditemukannya dokumen Roadmap penelitian pada Program Studi.</p> <p>Sapras Penelitian Rujukan pustaka masih sangat minim, rata-rata dosen tetap prodi mengambil bahan kajian hanya dari buku yang tahunnya juga sudah begitu lama</p> <p>Standar Proses PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • PkM yang dilaksanakan dosen belum melembaga, • belum memiliki output dan belum ada review ataupun moneyv terkait PKM yang dilaksanakan. • masih kurangnya minat dosen tetap prodi melaksanakan PKM. <p>Standar Pelaksana PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada ditemukan dosen tetap prodi yang memiliki Roadmap PkM. • Belum ada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dosen-dosen.
4	PAI	<p>UPPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra dan Renop masih disatukan sehingga belum memenuhi ketentuan yang berlaku dimana haruslah terdapat diantara keduanya 2. Renstra belum memenuhi kelengkapan legalitas dikarenakan belum terdapat cap pengesahan di Surat Keputusan 3. Renop belum memenuhi kelengkapan legalitas dikarenakan belum terdapat cap pengesahan di Surat Keputusanselain itu Dokumen RENOP haruslah belum mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan sehingga salah satu itemnya yaitu pencantuman IKT <p>Standar Kompetensi Lulusan. PAI Fakultas Agama Islam ditemukan mahasiswa tidak memiliki sertifikat kompetensi</p> <p>Standar Isi Pembelajaran, Prodi PAI Fakultas Agama Islam tidak terdapat SK Tim penyusun kurikulum selain itu tidak terdapat SK pemberlakuan kurikulum, tidak menemukan Bukti Dokumen Peninjauan kurikulum pada tahun 2018</p> <p>Standar Proses Pembelajaran</p>

		<p>(RPS), Tidak semua dosen membuat RPS hanya Terdapat 20 RPS dari 60 mata kuliah, absensi perkuliahan dominan tidak sesuai dengan RPS, dosen dalam melaksanakan absensi perkuliahan dominan tidak mengisi materi pembelajaran</p> <p>Standar Pengelolaan pembelajaran Tidak terdapat dokumen laporan monitoring pembelajaran</p> <p>Standar Pengelolaan pembelajaran Tidak terdapat kebijakan tertulis tentang suasana akademik</p> <p>Standar Pembiayaan Tidak tersedia pedoman dan bukti implementasi penetapan biaya pendidikan mahasiswa</p> <p>Standar Isi Penelitian Tidak terdapat rencana strategis penelitian</p> <p>Standar Penilaian Penelitian Tidak terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</p>
5	Magister Pendidikan Islam	<p>Buku Kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis pemenuhan CPL tidak diukur dengan metode hanya disesuaikan dengan kondisi lapangan serta peluang yg ada. Selain itu, capaian pembelajaran baru 80-99% sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI/ SKKNI (level 8). • Kelengkapan dokumen tentang “academic excellence” HANYA meliputi data tentang kinerja dosen, kualitas lulusan. Juga, TIDAK ADA Kelengkapan dokumen tentang university value sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi. <p>HAKI/PATEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedia karya intelektual (Hak paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk terStandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. <p>Standar Kompetensi Lulusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya mahasiswa Calon lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi. • Tidak adanya informasi jumlah lulusan yang mengisi tracer studi, selain itu sebagian besar

		<p>mahasiswa sudah bekerja (Guru, Pengawas, Kepala sekolah, ASN) sehingga masa tunggu lulusan hanya diisi oleh beberapa lulusan saja yang memang belum bekerja.</p> <p>Standar Isi Pembelajaran (kurikulum)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedianya pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran • Belum ada capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan jenjang KKNI sesuai level program pendidikan (Permendikbud No. 3 tahun 2020)/KKNI yang sesuai). • Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum dilakukan secara berkala dan belum melibatkan pemangku kepentingan internal, serta melibatkan pemangku kepentingan eksternal • Terdapat sekitar 60-79% mata kuliah program pascasarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (case method) atau project based learning sebagai bobot evaluasi • Dokumen terkait RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS hanya terdapat 12 RPS dengan 18 Mata Kuliah. • Tidak terdapat buku panduan Penasehat akademik disebabkan masih belum jelas aturan tentang Pembimbing akademik di jenjang Magister (S2). Selain itu, juga tidak terdapat dokumen kebijakan tentang suasana akademik. • Tidak tersedia keterlaksanaan dan keberkayaan program serta kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium. <p>Standar Pengelolaan Pembelajaran Belum Ada kerjasama Internasional.</p> <p>Standar Dosen dan Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat DTSP yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional (PDKII), semntara itu persentase jumlah DTSP yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional (PDKIN) berada di bawah 70% yaitu 10%. • Tidak terdapat dosen yang memiliki skor TOEFL
--	--	--

		<p>minimal 500. TOEFL hanya dilaksanakan sebagai syarat masuk sewaktu melanjutkan sekolah program doktoral, selain itu DTSP tidak pernah lagi mengikuti TOEFL ataupun kegiatan kursus peningkatan kemampuan berbahasa Inggris.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedia kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (operator) tetap untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Khususnya operator PDPT yang masih meminjam dari operator universitas. Selain itu, tenaga kependidikan belum pernah mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun. <p>Sapas Penilaian Pembelajaran</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu Internal tidak berjalan karena tidak terdapat struktur Unit Penjaminan Mutu fakultas. Monitoring dan evaluasi hanya dilakukan setiap semester dalam rapat evaluasi. Pelaporan hanya dilakukan melalui rapat evaluasi oleh Wadir I dan Kaprodi, sehingga, tidak tersedia persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja Dosen (KMKD), tidak tersedia persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan (KMLTK), tidak tersedia indek kepuasan civitas akademika (IKCA) terhadap layanan sarana dan prasarana, tidak terlaksana hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran (HASP), serta tidak tersedia kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Sapas Pendidikan</p> <p>Tidak tersedia ruang perpustakaan di fakultas pascasarjana. Perpustakaan yang memuat buku referensi yang relevan terkait program studi yang ada di fakultas diletakkan di perpustakaan universitas “Pascasarjana Corner”. Jumlah buku yang tersedia cukup terbatas hanya mencapai puluhan buku teks. Tidak tersedia bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional, serta tidak tersedia bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi</p> <p>Standar Penelitian dan PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedia dokumen tentang renstra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memuat Roadmap penelitian dan pengabdian, serta belum memiliki Research Group dan Roadmap Penelitian dan pengabdian, Prodi harus memiliki RG dan RM yang relevan dengan VMTS PS, sehingga dosen
--	--	---

		<p>dapat melakukan penelitian dan pengabdian berdasarkan RM penelitian dan pengabdian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTSP telah melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang keahlian tetapi tidak tersedia laporannya, selain itu tidak tersedia artikel pada Jurnal internasional (JI)/jumlah DTSP/tahun, dan jurnal Internasional terindeks Scopus.
6	Magister Hukum	<p>Buku Kurikulum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis pemenuhan CPL tidak diukur dengan metode hanya disesuaikan dengan kondisi lapangan serta peluang yg ada • Kelengkapan dokumen tentang “academic excellence” Hanya meliputi data tentang kinerja dosen, kualitas lulusan. • Tidak Ada Kelengkapan dokumen tentang university value sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi. • sekitar 60-79% mata kuliah tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajarannya dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI • Integrasi kegiatan pe- nelitian dan PkM dalam pembelajaran sehingga perlu pps menyampaikan kepada seluruh dosen prodi untuk mengintegrasikan seluruh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran. • belum ada capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan jenjang KKNI ses- uai level program pendidikan (Permendikbud No. 3 tahun 2020)/KKNI yang sesuai) sehingga PPS perlu mencari informasi tentang Asosiasi Magister hukum guna memperoleh informasi mata kuliah asosiasi. • Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum dilakukan secara berkala dan hanya melibatkan Dosen untad (Dr. Sutarman Yodo, S.H., M.P0 ,dosen UMI (Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H) sehingga PPS perlu melaksanakan peninjauan kurikulum minimal 2 tahun sekali maksimal 4 tahun sekali. • sekitar 60-79% mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (case meth- od) atau project based learning sebagai bobot

		<p>evaluasi sehingga perlu pps melakukan pengembangan dalam berbagai metode pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS hanya terdapat 15 RPS dengan 22 Mata Kuliah. • tidak adanya Gugus Kendali Mutu sehingga Monitoring dan evaluasi pembelajaran tidak terlaksana. Perlu UPPS mengajukan SDM untuk menduduki GKM tersebut. • tidak terdapat buku panduan Penasehat akademik disebabkan masih belum jelas aturan tentang Pembimbing akademik di jenjang Magister (s2) • tidak memiliki dokumen kebijakan tentang suasana akademik • belum adanya Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium sehingga UPPS perlu menetapkan kebijakan dalam keterlaksanaan dan keberkayaan suasana akademik tersebut. <p>HAKI/PATEN</p> <p>Pada saat menelaah dokumen di Program Studi Magister Hukum sebagai permasalahan karya intelektual(Hak paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Per- lindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk ter Standardisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. Sehingga pps perlu memacu mahasiswa dalam pembuatan karya intelektual tersebut</p> <p>Panduan Akademik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada saat menelaah dokumen di Program Studi Magister Hukum sebagai permasalahan belum adanya skor TOEFL atau setingkatnya untuk program studi dari Pusat Bahasa Unismuh Palu atau yang ditunjuk oleh Unismuh Palu dengan range Magister/ Doktor >500 • Pada saat menelaah dokumen di Program Studi
--	--	---

		<p>Magister Hukum sebagai permasalahan belum adanya Mahasiswa Calon lulusan yang memiliki sertifikat sehingga UPPs perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar mahasiswa calon lulusan bisa memiliki sertifikat kompetensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada saat menelaah dokumen di Program Studi Magister Hukum sebagai permasalahan tidak adanya informasi jumlah lulusan yang mengisi tracer studi sehingga pps perlu berkoordinasi di Universitas agar memperoleh informasi hasil tracer studi. • Pada saat menelaah dokumen di Program Studi Magister Hukum sebagai permasalahan Sebagian besar mahasiswanya sudah bekerja (asn, polisi, advokat, anggota Dewan) sehingga masa tunggu lulusan hanya diisi oleh beberapa lulusan saja yang memang belum bekerja. <p>Kerjasama Belum Ada kerjasama Internasional</p> <p>Standar Dosen dan Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> • jumlah DTSPS dengan jabatan akademik LK tidak tersedia • Pada saat menelaah dokumen di prodi magister jumlah DTSPS dengan jabatan akademik GB tidak tersedia. • tidak terdapat DTSPS yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional (PDKII). • persentase jumlah DTSPS yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional (PDKIN) berada di bawah 70% yaitu 10% atau setara dengan 0 poin. • tidak terdapat dosen yang memiliki skor TOEFL minimal 500 (TOEFL500) • persentase kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya berada di bawah 6% yaitu 5% atau setara dengan 0 poin • persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yg berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir tidak tersedia • persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen, yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat sejumlah 30% atau setara dengan 2
--	--	--

		<p>poin</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak tersedia kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (operator) tetap untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. • tidak terdapat tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun. <p>Standar Kompetensi Lulusan Programmer/operator belum memiliki sertifikat Kompetensi</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedia persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja Dosen (KMKD) • tidak tersedia persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan (KMLTK) • tidak tersedia indek kepuasan civitas akademika (IKCA) terhadap layanan sarana dan prasarana pada skala 1 – 4 • tidak terlaksana hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran (HASP) • problem tidak tersedia kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran/Persentase mahasiswa sangat puas (MSP) <p>Standar Saprasi Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60% atau setara dengan 0 poin, unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. • Pada saat menelaah dokumen di prodi magister hukum, sebagai problem kapasitas ruang kuliah 64 m², tidak memiliki AC, dan memiliki penerangan yang cukup. • tidak tersedia ruang perpustakaan • tidak tersedia ruang pelayanan kesehatan • problem hanya terdapat 70 bahan pustaka berupa buku teks sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi, jumlah ini lebih kecil dari 450 judul atau setara dengan 0 poin • tidak tersedia bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional • tidak tersedia bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi <p>Saprasi Proses Penelitian</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • tidak tersedia dokumen tentang renstra penelitian yang memuat Roadmap penelitian • belum memiliki Research Group dan Roadmap Penelitian • dosen melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian tetapi laporan tidak ada <p>Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak ada artikel pada Jurnal internasional (JI)/jumlah DTPS/tahun, dan jurnal Internasional terindeks Scopus • tidak ada unit bisnis atau setara hasil riset per prodi per tahun, kontrak kerja dengan pihak ke tiga per prodi per tahun dan dana penelitian eksternal yang diterima program studi per tahun, 40% prodi dapat memenuhi indikator kinerja tambahan. <p>Sapras Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan buku e-book / hardcopy, ketersediaan prosiding, E-Journal Internasional, kepuasan stakeholder terhadap sarana prasarana dan laboratorium yang tersertifikasi masih kurang setara dengan 0 poin, pemenuhan sarana dan prasarana minimal memenuhi aspek sarana dan prasarana penelitian <p>Standar Proses PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada saat memeriksa dokumen di prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah palu, tidak tersedia dokumen tentang renstra pengabdian yang memuat Roadmap pengabdian • Hanya 5% Dosen melaksanakan kegiatan PKM • tidak ada hasil PKM • Tidak semua dosen melakukan PkM sesuai bidang ilmunya <p>Standar Sapras PKM Ketersediaan buku (E-book atau hard copy) kurang dari 100 judul atau setara dengan nilai 0</p>
7	PG-PAUD	<p>Standar Kompetensi Lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada dilakukan analisis pemenuhan CPL • tidak ditemukan dokumen tentang peninjauan CPL • belum ada dokumen terkait "academic excellent" • Belum ada Haki/Paten yang dihasilkan oleh mahasiswa • Calon lulusan PAUD belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi.

		<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada mahasiswa PAUD yang mengikuti kegiatan MBKM • tidak ditemukan dokumen mengenai tracer study <p>Standar Isi pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • belum ada matakuliah diintegrasikan dengan hasil PKM • Tidak ditemukan dokumen mekanisme evaluasi dan dalam proses peninjauan kurikulum belum melibatkan alumni, dan pengguna lulusan • Belum ada kerjasama Internasional • Belum memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah <p>Standar Isi Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang dosen pengampu meneyerahkan RPS H-7 sebelum perkuliahan. • RPS tidak bisa diakses bebas oleh mahasiswa <p>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • belum ada dosen memiliki Jafung • belum ada dosen dengan pendidikan S3 • Belum memiliki Guru Besar <p>Standar Pengelolaan pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak ditemukan dokumen pedoman pembimbingan akademik • Tidak ditemukan kebijakan tertulis tentang suasana akademik • Belum ada tidak lanjut (RTL) dari hasil evaluasi yang dilaksanakan <p>Standar Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi hasil Penelitian DTSP masih rendah antara lain: sebagai presenter dalam forum ilmiah, jumlah artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS, jumlah artikel pada Jurnal Internasional, jumlah artikel pada Seminar Internasional, jumlah artikel pada Seminar Nasional serta Hilirisasi Hasil Penelitian DTSP masih rendah (Haki,Buku ajar,Buku Teks) • Indikator Kinerja Tambahan-Unit Bisnis, memiliki peluang untuk dikembangkan dan memiliki peluang kerjasama dengan berbagai pihak <p>Standar Isi Penelitian</p> <p>Isi penelitian masih minim jumlah rujukan (jurnal dan buku), isi atau tema penelitian mengantisipasi permasalahan global</p> <p>Standar Proses Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi belum memiliki Bukti shahih (dokumen
--	--	---

		<p>perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi dan Peneliti belum memiliki Road Map Penelitian <p>Standar Penilaian Penelitian Tidak tersedianya Pedoman Penilaian Penelitian, Instrumen Penilaian, Pelaksanaan monev, Proses Review dan Diseminasi di Prodi</p> <p>Standar Pelaksana Peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada Kelompok Riset yang dibentuk baik di tingkat lembaga, fakultas dan prodi • Tidak tercapai 1 judul penelitian setiap tahun setiap dosen <p>Standar Sapras Penelitian Tidak memiliki Laboratorium Riset</p> <p>Standar Hasil PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian • Tidak Haki yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan /atau industry <p>Standar Isi PKM Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan PkM dan pelaksanaan secara multi dan lintas ilmu masih kurang</p> <p>Standar Proses PKM Prodi tidak memiliki Road map PKM</p>
8	PNF	<p>Standar Kompetensi Lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada dilakukan analisis pemenuhan CPL • Tidak ditemukan dokumen tentang peninjauan CPL • Belum ada Haki/Paten yang dihasilkan oleh mahasiswa • Calon lulusan PNF belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi • Belum ada mahasiswa PNF yang mengikuti kegiatan MBKM • belum ada dokumen terkait "academic excellent" • tidak ditemukan dokumen mengenai tracer study <p>Standar Isi pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada matakuliah diintegrasikan dengan hasil PKM • Tidak ditemukan dokumen mekanisme evaluasi dan dalam proses peninjauan kurikulum belum melibatkan alumni, dan pengguna lulusan • Belum ada kerjasama Internasional • Belum memiliki akreditasi atau sertifikasi inter-

		<p>nasional yang diakui pemerintah</p> <p>Standar Proses Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang dosen pengampu menyerahkan RPS H-7 sebelum perkuliahan. • RPS tidak bias diskres bebas oleh mahasiswa • Ditemukan beberapa mata kuliah yang materi di BA perkuliahan tidak sesuai dengan RPS <p>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • belum ada dosen memiliki Jafung Lektor • belum ada dosen dengan pendidikan S3 <p>Standar Pengelolaan pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ditemukan dokumen pedoman pembimbingan akademik • Tidak ditemukan kebijakan tertulis tentang suasana akademik <p>Standar Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi hasil Penelitian DTSP masih rendah antara lain: sebagai presenter dalam forum ilmiah, jumlah artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS, jumlah artikel pada Jurnal Internasional, jumlah artikel pada Seminar Internasional, jumlah artikel pada Seminar Nasional • Hilirisasi Hasil Penelitian DTSP masih rendah (Haki,Buku ajar,Buku Teks) Indikator Kinerja Tambahan-Unit Bisnis, memiliki peluang untuk dikembangkan dan memiliki peluang kerjasama dengan berbagai pihak <p>Standar Isi Penelitian</p> <p>Isi penelitian masih minim jumlah rujukan (jurnal dan buku), isi atau tema penelitian mengantisipasi permasalahan global</p> <p>Standar Proses Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi belum memiliki Bukti shahih (dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian) • Prodi dan Peneliti belum memiliki Road Map Penelitian <p>Standar Penilaian Penelitian</p> <p>Tidak tersedianya Pedoman Penilaian Penelitian, Instrumen Penilaian, Pelaksanaan monev, Proses Review dan Diseminasi di Prodi</p> <p>Standar Pelaksana Peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada Kelompok Riset yang dibentuk baik di tingkat lembaga, fakultas dan prodi • Tidak tercapai 1 judul penelitian setiap tahun setiap dosen
--	--	--

		<p>Standar Sapras Penelitian Tidak memiliki Laboratorium Riset</p> <p>Standar Hasil PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian • Minimnya persentase luaran hasil PkM lokal, nasional, dan internasional • Minimnya persentase jumlah Haki yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri <p>Standar Isi PKM Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan PkM dan pelaksanaan secara multi dan lintas ilmu masih kurang</p> <p>Standar Proses PKM Prodi tidak memiliki Road map PKM</p>
9	Bahasa Inggris	<p>Standar Kompetensi Lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada dilakukan analisis pemenuhan CPL • Tidak ditemukan dokumen tentang peninjauan CPL • Belum ada dokumen terkait "academic excellent" • Belum ada Haki/Paten yang dihasilkan oleh mahasiswa • Calon lulusan Bahasa Inggris belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi • Tidak ditemukan dokumen mengenai tracer study <p>Standar Isi pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • belum ada matakuliah diintegrasikan dengan hasil PKM • Tidak ditemukan dokumen mekanisme evaluasi dan dalam proses peninjauan kurikulum belum melibatkan alumni, dan pengguna lulusan • Belum ada kerjasama Internasional • Belum memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah <p>Standar Proses Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang dosen pengampu menyerahkan RPS H-7 sebelum perkuliahan. • RPS tidak bias diakses bebas oleh mahasiswa • Ditemukan beberapa mata kuliah yang materi di BA perkuliahan tidak sesuai dengan RPS <p>Standar Penilaian Pembelajaran Menggunakan 5 prinsip penilaian dan ada rubrik penilaian tapi belum berlaku untuk semua matakuliah</p> <p>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • belum ada dosen memiliki Jafung • belum ada dosen dengan pendidikan S3

		<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki Guru Besar <p>Standar Pengelolaan pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ditemukan dokumen pedoman pembimbingan akademik • Tidak ditemukan kebijakan tertulis tentang suasana akademik • Belum ada tidak lanjut (RTL) dari hasil evaluasi yang dilaksanakan <p>Standar Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi hasil Penelitian DTSP masih rendah antara lain: sebagai presenter dalam forum ilmiah, jumlah artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS, jumlah artikel pada Jurnal Internasional, jumlah artikel pada Seminar Internasional, jumlah artikel pada Seminar Nasional serta Hilirisasi Hasil Penelitian DTSP masih rendah (Haki,Bukuajar,Buku Teks) • Indikator Kinerja Tambahan-Unit Bisnis, memiliki peluang untuk dikembangkan dan memiliki peluang kerjasama dengan berbagai pihak <p>Standar Isi Penelitian</p> <p>Isi penelitian masih minim jumlah rujukan (jurnal dan buku), isi atau tema penelitian mengantisipasi permasalahan global</p> <p>Standar Proses Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi belum memiliki Bukti shahih (dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian) • Prodi dan Peneliti belum memiliki Road Map Penelitian <p>Standar Penilaian Penelitian</p> <p>Tidak tersedianya Pedoman Penilaian Penelitian, Instrumen Penilaian, Pelaksanaan monev, Proses Review dan Diseminasi di Prodi</p> <p>Standar Pelaksana Peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada Kelompok Riset yang dibentuk baik di tingkat lembaga, fakultas dan prodi • Tidak tercapai 1 judul penelitian setiap tahun setiap dosen <p>Standar Supras Penelitian</p> <p>Tidak memiliki Laboratorium Riset</p> <p>Standar Hasil PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian • Tidak Haki yang diterapkan di masyarakat, dunia
--	--	---

		<p>usaha, dan /atau industri</p> <p>Standar Isi PKM Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan PkM dan pelaksanaan secara multi dan lintas ilmu masih kurang</p> <p>Standar Proses PKM Prodi tidak memiliki Road map PKM</p>
10	IKOR	<p>Standar Kompetensi Lulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada dilakukan analisis pemenuhan CPL • Belum ada dilakukan peninjauan CPL • belum ada dokumen terkait "academic excellent" • Belum ada Haki/Paten yang dihasilkan oleh mahasiswa • belum calon lulusan IKOR belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi • Belum ada mahasiswa IKOR yang mengikuti kegiatan MBKM <p>Standar Isi pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada matakuliah diintegrasikan dengan hasil penelitian dan PKM • Tidak ditemukan dokumen mekanisme penyusunan kurikulum • Belum ada kerjasama Internasional • Belum memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. • Belum ada mata kuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (case method) atau project based learning sebagai bobot evaluasi <p>Standar Proses Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPS tidak bisa diakses bebas oleh mahasiswa • Integrasi AIK dalam pembelajaran belum ada • Belum ada Integrasi hasil penelitian dalam proses pembelajaran • Tidak ada Integrasi hasil PkM dalam proses pembelajaran • Belum melakukan Monev • Belum semua dosen pengampu mata kuliah menyerahkan RPs sebelum perkuliahan dimulai serta RPS belum terupdate <p>Standar Penilaian Pembelajaran Menggunakan 5 prinsip penilaian dan ada rubrik penilaian tapi belum berlaku untuk semua matakuliah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • belum ada dosen memiliki Jafung

		<ul style="list-style-type: none"> • belum ada dosen dengan pendidikan S3 • Belum memiliki Guru Besar <p>Standar Pengelolaan pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak ditemukan dokumen pedoman pembimbingan akademik • Tidak ditemukan kebijakan tertulis tentang suasana akademik • belum melakukan Monev <p>Standar Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi hasil Penelitian DTSP masih rendah antara lain: sebagai presenter dalam forum ilmiah, jumlah artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau SCOPUS, jumlah artikel pada Jurnal Internasional, jumlah artikel pada Seminar Internasional, jumlah artikel pada Seminar Nasional • Hilirisasi Hasil Penelitian DTSP masih rendah (Haki,Buku ajar,Buku Teks) • Indikator Kinerja Tambahan-Unit Bisnis, memiliki peluang untuk dikembangkan dan memiliki peluang kerjasama dengan berbagai pihak <p>Standar Isi Penelitian</p> <p>Isi penelitian masih minim jumlah rujukan (jurnal dan buku), isi atau tema penelitian mengantisipasi permasalahan global</p> <p>Standar Proses Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi belum memiliki Bukti shahih (dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian) • Prodi dan Peneliti belum memiliki Road Map Penelitian <p>Standar Penilaian Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedianya Pedoman Penilaian Penelitian, Instrumen • Penilaian, Pelaksanaan monev, Proses Review dan Diseminasi di Prodi <p>Standar Pelaksana Peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada Kelompok Riset yang dibentuk baik di tingkat lembaga, fakultas dan prodi • Tidak tercapai 1 judul penelitian setiap tahun setiap dosen <p>Standar Saprass Penelitian</p> <p>Tidak memiliki Laboratorium Riset</p> <p>Standar Hasil PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Haki yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri <p>Standar Isi PKM Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan PkM dan pelaksanaan secara multi dan lintas ilmu masih kurang</p> <p>Standar Proses PKM Prodi tidak memiliki Road map PKM</p>
11	Ilmu Administrasi Negara	<p>Syarat Khusus Di Prodi Administrasi negara DTSPS 13 orang, 8 orang terdaftar di PDDikti, 4 orang Lektor, 2 orang Asisten Ahli.</p> <p>Standar kompetensi lulusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar isi halaman kurikulum perlu diperbaiki • Misi program studi hanya terdiri dari 3 poin dari 5 poin yang ada pada perguruan tinggi • Belum terdapat laporan tracer study dan pengguna lulusan untuk mengukur umpan balik kepuasan pengguna <p>Standar Isi Pembelajaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat integrasi Penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran <p>Standar Proses Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPS pada semester ganjil 2022/2023 telah diperbaharui dengan jumlah 8 RPS dari total 27 mata kuliah (Untuk RPS lama lengkap); • Terdapat Dokumen RPS yang tidak sinkron dengan rubrik perkuliahan; • Terdapat rujukan bahan ajar yang sudah lama, perlu dilakukan pembaharuan <p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat laporan monev pembelajaran (terdapat rapat monev tingkat fakultas). <p>Standar Dosen dan Tendik Belum ada tenaga kepastakaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p> <p>Standar Saprasi Pendidikan Sarana infocus hanya terdapat 2 (dua) unit milik fakultas dari 3 (tiga) kelas untuk Prodi Administrasi Negara;.</p> <p>Standar Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki rerata unit bisnis atau setara hasil riset per prodi per tahun dan kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per tahun • Hanya 25% dosen memiliki HAKI <p>Standar Isi Penelitian</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Hanya terdapat 5 jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional, dan 3 jumlah buku yang dirujuk (Terbitan 5 tahun terakhir), Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary), Isi/tema penelitian mengantisipasi permasalahan global, Isi/ tema penelitian dilakukan join riset dengan mitra LN • tidak ada penelitian yang sesuai dengan rencana strategis penelitian dan Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan iptek yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha atau industri <p>Standar Proses Penelitian Tidak ada bukti sah tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan dan review proses penelitian, • penelitian yang dilakukan sesuai roadmap prodi, • pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, • kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian Log-book proses penelitian <p>Standar Penilaian Penelitian tidak ada dokumen Pedoman Penilaian Penelitian, tidak ada proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</p> <p>Standar Peneliti Tidak ada dokumen Renstra penelitian yang memuat roadmap penelitian, dan tidak memiliki kelompok riset</p> <p>Standar Supras Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan buku e-book/hardcopy < 100 judul buku e-book/hardcopy, demikian pula ketersediaan prosiding sangat minim. • Tidak ada survey kepuasan stakeholder terhadap sarana prasarana <p>Standar Pengelolaan Penelitian Tidak ada Dokumen pengelolaan penelitian</p> <p>Standar Pembiayaan PKM Tidak ada Dokumen pengelolaan pendanaan</p> <p>Standar Hasil PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada laporan survey baik dari dosen pelaksana PkM maupun UPM, • Tidak ada integrasi Bahan Ajar dan PKM Dosen, • Tidak ada publikasi artikel di jurnal PKM, • Tidak ada HKI yang diterapkan di masyarakat • Tidak ada publikasi PKM terindeks scopus
--	--	--

		<p>Standar Isi PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat hanya 1(satu) judul PKM Dosen yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu • DTPS Prdi Administrasi Negara tidak memiliki Road Map PKM, dan tidak memiliki kelompok Riset <p>Standar Proses PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan PKM DTPS tidak mengikuti panduan pelaksanaan abdimas serta Prodi Administrasi Negar tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang sesuai dengan panduan dan SOP. • PKM tidak dimulai dengan proposal • Beberapa PKM dilaksanakan di lingkungan persyarikatan tapi tidak memiliki dokumen • PKM dilaksanakan melibatkan mahasiswa namun tidak ada dokumentasi berupa surat tugas • Tidak Ada Road map PKM Prodi Administrasi Negara • Hanya ada 1 artikel PkM pada tahun ajaran 2021-2022 <p>Standar Penilaian PKM semua indikator aspek penilaian tidak sesuai (tidak memiliki laporan survei:</p> <p>Standar Sapras PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi Administrasi Negara tidak memiliki Laboratorium Riset • kelengkapan buku/e-book masih minim, Prodi Administrasi Negara hanya memiliki kurang dari 100 judul buku/e-book dan serta tidak ada jurnal terakreditasi <p>Standar Pengelolaan PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Rencana Strategis (RENSTRA) PKM dan tidak ada laporan Monev dan diseminasi hasil PkM • tidak ada dana PKM internal yang memadai
12	Sosiologi	<p>Standar kompetensi lulusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis pemenuhan CPL belum menggunakan metode sah dan relevan dan tidak menunjukkan peningkatan CPL; • Tidak ada dokumen tentang “academic excellence” yang meliputi data tentang daya tarik program studi, kinerja dosen, kualitas lulusan; • Mahasiswa calon lulusan belum memiliki sertifikat kompetensi sebagai pendamping ijazah;

		<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada mahasiswa Program Studi Sosiologi yang ikut/terlibat kegiatan MBKM; • Belum ada kegiatan tracer studi ditingkat UPPS (tracer ditingkat Universitas). <p>Standar Isi Pembelajaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Penelitian dan PKM dengan matakuliah kurang dari 26%; • Kurang dari 40% matakuliah program sarjana yang menggunakan pendekatan pemecahan kasus (case method) atau project based learning sebagai bobot evaluasi <p>Standar Proses Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait Penelitian namun pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait Penelitian baru maksimal 39%; • Belum ada Dokumen MONEV untuk proses pembelajaran. <p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian hanya mencakup unsur yang ke-6; yaitu teknik penilaian dengan menggunakan angket • Belum ada bukti sah bahwa nilai mahasiswa merupakan integrasi dari 4 aspek kompetensi; • Belum ada bukti sah bahwa soal ujian sdh terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review <p>Standar Dosen dan Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada dokumen tentang Persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja Dosen (KMKD)→ Belum ada monev (Belum ada Unit Penjamin Mutu); • Belum ada dokumen tentang Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan (KMLTK). <p>Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit Pengelola Program Studi tidak memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik; • UPPS tidak memiliki bukti Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran <p>Standar Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada DTPS di Prodi Sosiologi yang mempresentasikan hasil penelitiannya di seminar nasional dan Internasional demikian pula • Tidak ada DTPS mengirimkan artikel penelitiannya
--	--	--

		<p>pada Jurnal Internasional Bereputasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Hilirisasi hasil penelitian oleh DTSP berupa Haki, dan Buku ajar, masih minim (<50%); • pada aspek indikator kinerja tambahan tidak ditemukan unit bisnis, tidak ada kontrak kerja dan tidak ada penelitian eksternal yang diterima DTSP. <p>Standar Isi Penelitian Kurangnya jumlah rujukan dalam penelitian serta kurangnya penelitian yang mengantisipasi permasalahan global pada penelitian DTSP di Prodi Sosiologi</p> <p>Standar Proses Penelitian Tidak adanya anggaran penelitian bagi DTSP Prodi Sosiologi dari fakultas maupun universitas merupakan salah satu faktor rendahnya minat melakukan penelitian</p> <p>Standar Peneliti Belum ada Kelompok Riset yang dibentuk baik di tingkat program studi, fakultas dan lembaga</p> <p>Standar Saprass Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan buku e-book/hardcopy < 100 judul buku e-book/hardcopy, demikian pula ketersediaan prosiding sangat minim. • Tidak ada survey kepuasan stakeholder terhadap sarana prasarana • Sebagian besar artikel penelitian DTSP diterbitkan di jurnal kalangan sendiri, yaitu Jurnal yang diterbitkan Prodi Administrasi Negara, jurnal ini tidak terakreditasi Sinta <p>Standar Pengelolaan Penelitian Tidak ada Dokumen pengelolaan penelitian</p> <p>Standar Hasil PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada laporan survey baik dari dosen pelaksana PkM maupun UPM; • Tidak ada integrasi Bahan Ajar dan PkM dosen; • Tidak ada publikasi artikel di jurnal PkM; • Tidak ada HKI yang diterapkan di masyarakat; • Tidak ada publikasi PkM terindeks Scopus; • Tidak ada HKI PkM dalam 3 tahun terakhir. <p>Standar Isi PKM Tidak ada judul PkM dosen yang multidisiplin ilmu</p> <p>Standar Proses PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • PkM belum sesuai dengan panduan pelaksanaan abdimas; • PKM tidak dimulai dengan proposal; • PkM tidak memiliki dokumen perencanaan,
--	--	--

		<p>pelaksanaan dan pelaporan yang sesuai dengan panduan dan SOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengabdian dilaksanakan melibatkan mahasiswa namun tidak ada dokumentasi berupa surat tugas; • Hanya ada satu artikel PkM pada tahun ajaran 2021-2022; • PKM tidak relevan dengan roadmap Prodi. <p>Standar Penilaian PKM Semua indikator aspek penilaian tidak sesuai (tidak memiliki laporan survei:</p> <p>Standar Pelaksana PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanya ada satu judul PkM pada tahun 2022 • Tidak ada dosen yang memiliki road map • LPPM tidak memiliki kelompok kelompok riset • Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM namun tidak mencantumkan nama mahasiswa di Surat Tugas/SK <p>Standar Supras PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi Sosiologi tidak memiliki Laboratorium Riset • Prodi Sosiologi memiliki E-book atau buku dalam bentuk hard copi berjumlah kurang dari 100 judul buku <p>Standar Pengelolaan PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi sosiologi tidak memiliki Renstra PkM • Laporan PkM Prodi Sosiologi tidak dilaporkan secara periodik dan tidak terdokumentasi • Pada Prodi Sosiologi Tidak ada Monev kegiatan PkM dan tidak ada diseminasi hasil PkM <p>Standar Pembiayaan PKM Pada Prodi Sosiologi tidak ada dana PkM internal</p>
13	Teknik Sipil	<p>Standar kompetensi lulusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak melakukan peninjauan kurikulum 3 tahun sekali • Tidak ada SK penetapan Kurikulum • Analisis pemenuhan CPL belum menggunakan metode sah dan relevan dan tidak menunjukkan peningKatan CPL • Capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI/SKKNI 9 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI tidak terpenuhi 100%. • Kelengkapan CPL yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI tidak terpenuhi 100%.

		<ul style="list-style-type: none"> • Belum Ada Kelengkapan dokumen tentang university value sebagai acuan perumusan CPL penciri institusi • Belum ada Kelengkapan dokumen tentang “academic excellence • mahasiswa yang menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor/ Direktur/Dekan belum terpenuhi. • Belum ada Mahasiswa menghasilkan karya intelektual • Belum ada skor TOEFL atau setingkatnya untuk program studi dari Pusat Bahasa Unismuh Palu atau yang ditunjuk oleh Unismuh Palu. • Belum ada memiliki personal certification yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) • Tidak ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan kampus merdeka belajar atau prestasi tingkat nasional • Tidak ada laporan Tracer Studi <p>Standar Isi Pembelajaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat mata kuliah yang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajarannya dirumuskan dengan tidak mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi • belum ada Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran • belum ada capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan jenjang KKNi sesuai level program pendidikan (Permendikbud No. 3 tahun 2020)/KKNi yang sesuai) • 85% kurikulum program studi memiliki penciri Unismuh Palu dengan mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam perspektif Muhammadiyah • belum ada penggunaan pendekatan pemecahan kasus (case method) atau project based learning dalam implementasi kurikulum • belum ada Akreditasi/ sertifikasi internasional Program studi <p>Standar Proses Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua dosen pengampu mata kuliah menyerahkan RPs sebelum perkuliahan dimulai
--	--	---

		<p>serta RPS belum terupdate</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPS tidak ada yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran • bahwa masih banyak RPS yang tidak memuat isi-Isi materi pembelajaran • belum ada Evaluasi Pengelolaan pembelajaran • belum ada Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran • belum ada Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran <p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian. • Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran • Tidak ditemukan Instrumen penilaian ber- dasarkan jenis kompetensi • Tidak ada Review dan validasi instrument tes <p>Standar Dosen dan Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> • HAKI masih kurang hanya 18 % dari DTSP • Tidak memiliki Dosen S3 • Masih kurang Dosen yayasan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala • Masih kurang Dosen yang tersertifikasi • Masih kurang Dosen dan pegawai yang terlibat dalam kegiatan persyarikatan muhammadiyah • Tidak ada Laboran • Tidak Pustakawan • Dosen LB masih banyak <p>Standar Saprass Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedia peralatan laboratorium • Buku yang tersedia di perpustakaan masih kurang • Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional masih kurang <p>Standar Proses Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak tersedia dokumen tentang relevansi penelitian, yang menyangkut peta jalan penelitian, prodi memiliki peta jalan tetapi tidak memiliki dokumen Rencana induk penelitian yang memuat roadmap. • belum adanya dosen yang melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa, semua
--	--	--

		<p>Standar Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • masih kurangnya Publikasi Hasil Penelitian dosen tetap program studi • belum adanya bahan ajar yang terintegrasi dengan hasil penelitian. <p>Standar Penilaian Penelitian tidak memiliki pedoman penilaian penelitian</p> <p>Standar Hasil PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada laporan survey baik dari dosen pelaksana PkM maupun UPM • Tidak ada bahan ajar yang memasukkan hasil PkM • Publikasi artikel di jurnal PkM hanya 1 <p>Standar Proses PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • PkM dilaksanakan tidak sesuai alur yang ada dalam panduan PkM. • Tidak ada roadmap PkM Dosen • Pengabdian dilaksanakan melibatkan mahasiswa namun tidak ada dokumentasi dalam bentuk surat tugas. • UPPS perlu mendorong pengelola jurnal Surya Teknik agar konsisten dalam mengejar akreditasi minimal Sinta 6.
14	Teknik Informatika	<p>Standar kompetensi lulusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi Informatika menggunakan kurikulum KKNI yang belum disahkan oleh rektor. Selain itu, pemenuhan CPL belum menggunakan metode yang sah dan relevan. CPL juga ditinjau per 2 tahun berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal. • Tidak ada SK penetapan Kurikulum • Analisis pemenuhan CPL belum menggunakan metode sah dan relevan dan tidak menunjukkan peningkatan CPL • Capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI/SKKNI 9 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI tidak terpenuhi 100%. • Kelengkapan CPL yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI tidak terpenuhi 100%. • Belum Ada Kelengkapan dokumen tentang university value sebagai acuan perumusan CPL penciri institusi • Belum ada Kelengkapan dokumen tentang “academic excellence

		<ul style="list-style-type: none"> • mahasiswa yang menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor/ Direktur/Dekan belum terpenuhi. • Belum ada Mahasiswa menghasilkan karya intelektual • Belum ada skor TOEFL atau setingkatnya untuk program studi dari Pusat Bahasa Unismuh Palu atau yang ditunjuk oleh Unismuh Palu. • Belum ada memiliki personal certification yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) • Tidak ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan kampus merdeka belajar atau prestasi tingkat nasional <p>Standar Isi Pembelajaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat mata kuliah yang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajarannya dirumuskan dengan tidak mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI • belum ada Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran • belum ada capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan jenjang KKNI sesuai level program pendidikan (Permendikbud No. 3 tahun 2020)/KKNI yang sesuai) • 85% kurikulum program studi memiliki penciri Unismuh Palu dengan mengintegrasikan nilai- nilai islam dalam pers- pektif Muhammadiyah • belum ada penggunaan pendekatan pemecahan kasus (case method) atau project based learning dalam implementasi kurikulum • belum ada Akreditasi/ sertifikasi internasional Program studi <p>Standar Proses Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua dosen pengampu mata kuliah menyerahkan RPs sebelum perkuliahan dimulai serta RPS belum terupdate • RPS tidak ada yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran • bahwa masih banyak RPS yang tidak memuat isi- Isi materi pembelajaran
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • belum ada Evaluasi Pengelolaan pembelajaran • belum ada Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran • belum ada Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran <p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian. • Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran • Tidak ditemukan Instrumen penilaian ber- dasarkan jenis kompetensi • Tidak ada Review dan validasi instrument tes <p>Standar Dosen dan Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> • HAKI masih kurrang hanya 18 % dari DTSP • Tidak memiliki Dosen S3 • Masih kurang Dosen yayasan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala • Masih kurang Dosen yang tersertifikasi • Masih kurang Dosen dan pegawai yang terlibat dalam kegiatan persyarikatan muhammadiyah • Tidak ada Laboran • Tidak Pustakawan • Dosen LB masih banyak <p>Standar Supras Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku yang tersedia di perpustakaan masih kurang • Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional masih kurang <p>Standar Proses Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak tersedia dokumen tentang relevansi penelitian, yang menyangkut peta jalan penelitian, prodi memiliki peta jalan tetapi tidak memiliki dokumen Rencana induk penelitian yang memuat roadmap. • belum adanya dosen yang melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa, semua dosen dalam melaksanakan penelitian sebaiknya melibatkan mahasiswa <p>Standar Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • masih kurangnya Publikasi Hasil Penelitian dosen tetap program studi • belum adanya bahan ajar yang terintegrasi dengan hasil penelitian.
--	--	--

		<p>Standar Penilaian Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi Informatika tidak memiliki pedoman penilaian penelitian • tidak ada proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, • tidak adanya hasil penelitian yang terpublikasikan <p>Sapras Penelitian Prodi tidak memiliki peralatan minimal sarana dan prasarana penelitian di laboratorium dan tidak tersertifikasi</p> <p>Standar Hasil PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada laporan survey baik dari dosen pelaksana PkM maupun UPM • Tidak ada bahan ajar yang memasukkan hasil PkM • Publikasi artikel di jurnal PkM hanya 1 <p>Standar Proses PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • PkM dilaksanakan tidak sesuai alur yang ada dalam panduan PkM. • Tidak ada roadmap PkM Dosen • Pengabdian dilaksanakan melibatkan mahasiswa namun tidak ada dokumentasi dalam bentuk surat tugas. • UPPS perlu mendorong pengelola jurnal Surya Teknik agar konsisten dalam mengejar akreditasi minimal Sinta 6.
15	Kehutanan	<p>Penjaminan Mutu : UPPS dan Program Studi membentuk Unit Penjaminan Mutu di tingkat fakultas bahkan pada level program studi guna berkoordinasi dengan LPM dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mutu di tingkat fakultas dan prodi. Pembentukan Unit Penjaminan Mutu ini direncanakan terlaksana paling lambat satu semester.</p> <p>Standar kompetensi lulusan : Partisipasi mahasiswa dalam MBKM masih sedikit dimana terdapat 2 (dua) orang yang mengikuti kampus mengajar.</p> <p>Standar Isi Pembelajaran : Kuantitas pelaksanaan Integrasi penelitian dan PkM masih minim, dimana terdapat 4 mata kuliah yang merupakan integrasi penelitian dari 53 mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum prodi kehutanan</p> <p>Standar Proses Pembelajaran Terdapat RPS 23 dari 53 mata kuliah program studi . Selain itu, terdapat Dokumen RPS yang tidak sinkron</p>

		<p>dengan rubrik perkuliahan bahkan tidak terdapat rujukan bahan ajar</p> <p>Standar Dosen dan Tendik Belum ada tenaga kepastakaan dan tenaga laboran yang bersertifikasi.</p> <p>Standar Sapras Pendidikan Pada bagian sarana prasarana, infocus hanya terdapat 2 (dua) unit milik fakultas untuk 4 (empat) kelas yang tersedia</p> <p>Standar Hasil Penelitian Masih kurang Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang membuat buku Ajar dan teks book, dari 8 DTPS baru ada 2 Dosen yang membuat buku Ajar dan 1 teks book dalam 1 tahun terakhir, selain itu pula masih kurang DTPS yang memiliki HKI, dari 8 DTPS baru ada 2 HKI dalam 1 tahun terakhir</p> <p>Standar Isi Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • belum ditemukan adanya penelitian yang sesuai dengan rentra penelitian, baru ada 4 artikel yang terintegrasi dengan pembelajaran namun penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan iptek yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha atau industri dalam 1 tahun terakhir belum ditemukan. • Belum ada penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu dalam 1 tahun terakhir. <p>Standar Peneliti UPPS, Program Studi, hingga Dosen tidak memiliki Peta Jalan (Roadmap) penelitian</p> <p>Standar Proses Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi belum memiliki Roadmap penelitian sendiri sehingga dosen tetap program studi juga belum memiliki arah atau pun acuan didalam membuat Roadmap sesuai dengan bidang keilmuannya. • Unit penjaminan mutu belum ada, sehingga review proses penelitian secara berkala belum dilaksanakan. <p>Standar Penilaian Penelitian Program studi belum memiliki panduan penelitian ditingkat fakultas dan prodi sehingga review penilaian penelitian belum berjalan dengan baik</p> <p>Standar Peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosen program studi rata-rata belum memiliki roadmap penelitian • belum semua dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian baru sekitar 50% DTPS yang
--	--	---

		<p>melibatkan mahasiswa.</p> <p>Standar Saprass Penelitian belum adanya pustakawan sehingga jumlah buku, prosiding, e-book dan hard copy belum diketahui jumlahnya, selain itu juga belum tersedia jurnal Internasional terakreditasi yang berlangganan dengan prodi dan prodi belum memiliki laboratorium sendiri, saat ini masih memanfaatkan laboratorium dengan kampus lain namun baru sekitar 0,09% dosen yang memanfaatkannya.</p> <p>Standar Hasil PKM Sebagian besar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Tetap Program Studi tidak dilaksanakan secara melembaga, yakni tidak terdapat surat Tugas dan Surat Keterangan penyelesaian kegiatan dari LPPM dan prodi tidak memiliki dokumentasi laporan kegiatan.</p> <p>Standar Proses PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program studi belum memiliki Panduan PKM sehingga ketercapaian dokumen hasil monev kegiatan PKM belum dilakukan. • Program Studi juga belum memiliki roadmap terkait pengabdian kepada masyarakat.. <p>Standar Pembiayaan PKM Belum adanya alokasi pendanaan pengabdian internal ditingkat fakultas dan prodi.</p>
16	Agribisnis	<p>Penjaminan Mutu : Sistem Penjaminan Mutu tidak berjalan karena tidak ada struktur Unit Penjaminan Mutu di fakultas. Monitoring dan Evaluasi dilakukan hanya berupa pengawasan langsung dari Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerjasama tetapi tidak ada dokumen terkait kegiatan tersebut. Survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran pernah dilakukan tetapi tidak secara berkala. Tidak pernah ada survey kepuasan dosen dan tendik yang dilaksanakan, baik untuk proses pembelajaran, sarana dan prasarana maupun layanan akademik sehingga butir-butir audit yang tidak terpenuhi.</p> <p>Standar kompetensi lulusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Studi belum memiliki kelengkapan lembar pengesahan pada dokumen kurikulum dan tidak memuat academic excellence guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang daya tarik program studi, kinerja maupun kualitas lulusan. • Penyusunan kurikulum terbaru tidak melalui

		<p>Workshop Revisi/Peninjauan kurikulum sehingga keterlibatan tim ahli, stakeholder internal dan eksternal tidak terlihat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pembelajaran Semester tidak dikembangkan secara berkala yang dibuktikan dengan tidak adanya sumber pustaka terbaru dalam RPS (rata-rata merujuk pada sumber di atas 10 tahun) dan CPL tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kurikulum. • Tidak ada mahasiswa yang memiliki paten padahal hasil PKL dan skripsi mahasiswa banyak dalam bentuk produk dan berpotensi memperoleh paten. <p>Standar Isi Pembelajaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada RPS yang mengintergrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran padahal banyak dosen yang melakukan penelitian dan kegiatan PkM terkait Mata kuliah yang diampu. • Program Studi tidak memiliki dokumen kerjasama tingkat internasional dan tidak ada kegiatan kerjasama yang terdokumentasi/terlaksana (tidak ada laporan kegiatan kerjasama) <p>Standar Proses Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa BAP memuat materi-materi perkuliahan yang tidak sesuai dengan RPS yang dibuat. • Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tidak terupload di Spada atau di platform lain sehingga tidak dapat diakses oleh mahasiswa. <p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <p>Butir Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif, (2) otentik, (3) objektif, (4) akuntabel, dan (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi tidak terlaksana. Hal ini dilihat dari tidak adanya kontrak belajar yang tertulis, kesepakatan penilaian hanya disampaikan secara lisan.</p> <p>Standar Dosen dan Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari segi Kecukupan, DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) Agribisnis telah melebihi syarat jumlah dosen prodi yakni 9 orang DTSPS. Akan tetapi terdapat 4 DTSPS yang tidak memiliki latar belakang pendidikan terakhir yang sesuai dengan program studi. • Dosen LB yang dijadwalkan di program studi
--	--	---

		<p>mencapai 20% dari jumlah dosen keseluruhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan Program Studi tidak memiliki pustakawan, laboran, atau pun programmer. • Belum ada upaya pengembangan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan-pelatihan dan kegiatan pengembangan keterampilan dan kompetensi lainnya. <p>Standar Sapras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Studi tidak memiliki laboratorium dasar yang memadai. • Sistem Pembelajaran Daring (Spada) yang telah disediakan oleh universitas tidak dimanfaatkan dengan maksimal. • Bahan pustaka tidak ter-update dan jumlah buku tidak terdata dengan baik karena tidak adanya laboran. • Referensi pembelajaran, penelitian, dan PkM berupa jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi serta prosiding sangat kurang karena prodi tidak berlangganan. <p>Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • dosen PA (Pembimbing Akademik) tidak mengetahui Tupoksinya sebagai Penasehat Akademik dan pembimbingan tidak berlangsung maksimal. • Prodi tidak menyediakan Kartu Bimbingan Akademik dan Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi sehingga tidak terpantau pembimbingan mahasiswa kepada dosen PA dan Dosen Pembimbing Skripsi. Terdeteksi, Dosen PA hanya melaksanakan satu kali Pembimbingan Akademik yakni pada saat pengisian KRS. • Tidak ada buku Panduan Pengembangan Suasana Akademik. • Pengembangan Suasana Akademik juga tidak didukung dengan keberadaan Himpunan Mahasiswa Prodi. <p>Standar Pembiayaan</p> <p>Program Studi menyusun Rencana Anggaran Belanja hanya pada saat diminta menjelang Rapat Kerja Universitas, sehingga hal ini menunjukkan bahwa perencanaan Pendidikan dan Pembelajaran tidak menjadi prioritas.</p> <p>Standar Hasil Penelitian</p> <p>UPPS dan Prodi tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada</p>
--	--	--

		<p>masyarakat yang dilakukan oleh dosen.</p> <p>Standar Proses Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Studi tidak memiliki Roadmap penelitian, begitu pula Dosen Tetap PS. • Sebagian besar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Tetap Program Studi tidak dilaksanakan secara melembaga, yakni tidak terdapat surat Tugas dan Surat Keterangan penyelesaian kegiatan dari LPPM dan prodi tidak memiliki dokumentasi laporan kegiatan. <p>Standar Penilaian Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel Sebagian DTSPS yang terbit di Jurnal belum terakreditasi Sinta. • Jurnal Prodi diupayakan terakreditasi Sinta. • Terdapat Dosen Tetap Yayasan Program Studi yang tidak aktif menggunakan Google Scholarnya sehingga artikel yang telah terbit tidak terbaharui dan tidak terdata dengan baik sitasi yang diperoleh dosen. <p>Standar Hasil PKM</p> <p>Tidak ada dokumen terkait Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat baik peta jalan PkM Prodi maupun peta jalan PkM Dosen.</p>
17	Manajemen	<p>Penjaminan Mutu :</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu baru saja dibentuk tetapi belum memiliki SK Pengesahan. Tidak ada Siklus PPEPP yang terdokumentasi. Monitoring dan Evaluasi baru dilakukan dalam bentuk pengawasan langsung dari Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerjasama tetapi tidak ada dokumen terkait kegiatan tersebut. Tidak pernah dilakukan survei kepuasan mahasiswa dan dosen baik untuk proses pembelajaran, sarana dan prasarana maupun layanan akademik. sehingga banyak butir-butir audit yang tidak terpenuhi</p> <p>Standar kompetensi lulusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Studi memiliki kurikulum KKNi OBE akan tetapi kurikulum belum memiliki kelengkapan lembar pengesahan, belum memuat University Value, belum disusun dengan langkah-langkah yang seharusnya. Penyusunan kurikulum telah alumni dan stakeholder eksternal, tetapi tidak terdokumentasi dalam bentuk Daftar Hadir dan berita acara. • Rencana Pembelajaran Semester tidak terdokumentasi dengan lengkap di ruang prodi karena sebagian dosen tidak memasukkan RPS di

		<p>awal pelaksanaan semester sehingga prodi kesulitan melengkapi dokumen kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosen tidak mengembangkan RPS secara berkala, yang mana sumber ajar tidak diperbaharui sehingga ada RPS dengan sumber ajar yang lebih dari 10 tahun yang lalu. • RPS mata kuliah memiliki format yang berbeda-beda sehingga pada sebagian RPS dapat ditelusuri Rubrik Penilaian dan Sumber Pustaka, pada sebagian yang lain tidak. • Tracer Study baru satu kali dilakukan yakni Tracer Study lulusan dan tidak dilaksanakan berkala. Sedangkan Tracer Study Pengguna Lulusan belum pernah dilakukan sehingga indikator penilaian terhadap lulusan dalam segi Etika, Intelegensi, Bahasa, dll tidak dapat diukur. <p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butir Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif, (2) otentik, (3) objektif, (4) akuntabel, dan (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi tidak terlaksana. Hal ini dilihat dari tidak adanya kontrak belajar yang tertulis, kesepakatan penilaian hanya disampaikan secara lisan, dan hasil belajar tidak dapat diakses secara dari melalui SIMAK Unismuh Palu. • Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagian tidak memuat teknik dan instrumen penilaian, sehingga proses dan langkah-langkah penilaian dosen tidak terdeteksi <p>Standar Dosen dan Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosen memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor, dan Asisten Ahli. Tidak ada DTSP yang memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala. • Perpustakaan tidak memiliki pustakawan sehingga pendataan buku, pembaharuan sumber pustaka tidak dapat dilakukan secara berkala dan sistematis <p>Standar Sapras</p> <p>Tidak ada Jurnal Nasional terakreditasi dan Jurnal Internasional bereputasi yang terdata menjadi langganan program studi sehingga bahan pustaka up-to-date yang mendukung kegiatan Tridharma di program studi sangat kurang.</p>
--	--	---

	<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panduan tugas Akhir yang diedarkan kepada mahasiswa dan dosen tidak memiliki pengesahan sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, serta tidak ditemukan panduan Pembimbingan Akademik sehingga Dosen PA tidak memahami tupoksinya dengan baik. • Dalam proses akademik, mahasiswa tidak memegang Kartu Bimbingan Akademik sehingga proses pembimbingan akademik dari dosen Penasehat Akademik tidak terkontrol dengan baik. • Dalam proses penyelesaian tugas akhir, mahasiswa diberi kontrol bimbingan skripsi, tetapi tidak ada kontrol dari Program Studi sehingga kartu tersebut tidak pernah kembali ke Prodi, akibatnya pembimbingan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Skripsi tidak terawasi dengan baik. • Fakultas/Prodi tidak memiliki Pedoman Pengembangan Suasana Akademik sehingga kegiatan-kegiatan terkait pengembangan suasana akademik tidak terpandu dengan baik termasuk Kuliah Umum, Himpunan Mahasiswa dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. <p>Standar Pembiayaan</p> <p>Program Studi menyusun Rencana Anggaran Belanja hanya pada saat diminta menjelang Rapat Kerja Universitas, sehingga hal ini menunjukkan bahwa perencanaan Pendidikan dan Pembelajaran tidak menjadi prioritas.</p> <p>Standar Isi Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang belum memiliki akun google scholar dan SINTA • Kurangnya DTPS yang membuat buku Ajar dan teks book. Terdata dari 22 DTPS baru ada 1 Dosen yang membuat buku Ajar dan teks book. <p>Standar Proses Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya DTPS yang menerbitkan HKI di mana dari 22 DTPS, hanya terdapat 12 HKI yang telah terbit. • Belum ada panduan penelitian di tingkat prodi yang tersosialisasi sampai ke DTPS. • UPPS, Prodi dan DTPS belum memiliki Roadmap Penelitian yang mengacu pada Roadmap penelitian universitas. <p>Standar Penilaian Penelitian</p> <p>Unit Penjaminan Mutu yang telah dibentuk belum</p>
--	---

		<p>berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan belum adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian di tingkat prodi. Selama ini monev baru dilakukan di tingkat universitas</p> <p>Standar Hasil PKM Tidak ditemukan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen yang terintegrasi dengan proses pembelajaran, dibuktikan dengan tidak adanya hasil PkM yang menjadi referensi mengajar dosen yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester.</p> <p>Standar Isi PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Dosen Tetap Program Studi yang melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara multi dan lintas ilmu dalam setahun terakhir. • Tidak ada Dosen Tetap Program Studi yang melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Joint dengan luar Negeri <p>Standar Proses PKM Sebagian besar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Tetap Program Studi tidak dilaksanakan secara melembaga, yakni tidak terdapat surat Tugas dan Surat Keterangan penyelesaian kegiatan dari LPPM dan prodi tidak memiliki dokumentasi laporan kegiatan</p> <p>Standar Pelaksana PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada dokumen terkait Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat. • Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dosen pengabdian dan terdata dalam BKD tidak menunjukkan keterlibatan mahasiswa. Tidak ada dokumen yang menunjukkan hal tersebut.
18	Ilmu Hukum	<p>Standar kompetensi lulusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak ditemukan dokumen laporan tentang proses perubahan kurikulum dari KKNi ke MBKM sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Standar kompetensi; • tidak ditemukan dokumen laporan Tracer Study sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Standar kompetensi. <p>Standar Isi Pembelajaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak ditemukan adanya dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar isi pembelajaran;

		<ul style="list-style-type: none"> • Buku kurikulum belum ada, baru dalam bentuk draf dan belum ada pengesahan (SK. Rektor); • belum ditemukan adanya landasan filosofi, sosiologis, dan historis pada kurikulum tahun 2017 yang berbasis KKNI wajib dimasukan landasan penyusunan kurikulum yakni filosofi, sosiologis, dan historis; • ditemukan tidak adanya Akreditasi/ sertifikasi internasional Program studi sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar isi pembelajaran. <p>Standar Proses Pembelajaran : Rencana pembelajaran semester (RPS) terdapat RPS berjumlah 55, tapi belum ditandatangani oleh dosen pengampu matakuliah dan Ketua Prodi sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar proses pembelajaran.</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran Tidak ditemukan adanya dokumen bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi. sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar penilaian.</p> <p>Standar Dosen dan Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak ditemukan adanya DTSPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional (PDKII) sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar dosen dan tenaga kependidikan; • tidak ditemukan Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 (TOEFL500) sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar dosen dan tenaga kependidikan; • ditemukan instrument Persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja Dosen (KMKD) tapi tidak terdapat laporan kepuasan mahasiswa sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar dosen dan tenaga kependidikan; • tidak ditemukan dokumen survey kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan (KMLTK) sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar dosen dan tenaga kependidikan. <p>Standar Saprasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • ditemukan tidak adanya ruang pelayanan kesehatan sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar sarana dan prasarana; • ditemukan perpustakaan tidak memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar sarana dan prasarana;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • tidak ditemukan dokumen laporan Indek kepuasan civitas akademika (IKCA) terhadap layanan sarana dan prasarana sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar sarana dan prasarana; • tidak ditemukan dokumen laporan Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran (HASP) sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar sarana dan prasarana; <p>Standar Pengelolaan Pembelajaran tidak ditemukan dokumen laporan keterlaksanaan pembimbingan akademik sehingga hal tersebut tidak sesuai Standar pengelolaan pembelajaran.</p> <p>Standar Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak ditemukan dokumen laporan ketersediaan pedoman dan implemetasi penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal. • Pada saat wawancara dengan WD 1 Fak Hukum tidak ditemukan dokumen laporan ketersediaan pedoman dan implemetasi penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal. <p>Standar Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada DTSP sebagai presenter di Seminar Nasional dan Internasional sehingga tidak memiliki prosiding di tingkat nasional dan internasional; • Tidak ada artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi. <p>Standar Isi Penelitian Tidak ada Penelitian DTSP pada Prodi Ilmu Hukum yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu</p> <p>Standar Penilaian Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Pedoman Penilaian Penelitian di Prodi hukum; • Tidak dilakukan Sosialisasi Pedoman Penelitian kepada DTSP oleh dosen yang telah mengikuti sosialisasi di LP2M. <p>Standar Peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Road map peneliti di Prodi Hukum; • Tidak ada Kelompok Riset yang dibentuk baik ditingkat prodi maupun fakultas <p>Standar Sapras Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi Ilmu Hukum Tidak berlangganan Jurnal nasional terakreditasi termasuk E-journal; • Prodi Ilmu Hukum Tidak berlangganan Jurnal Internasional terakreditasi termasuk E-journal;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana. <p>Standar Hasil PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dilaksanakan survei setelah pelaksanaan PKM oleh DTSP sehingga Presentase kepuasan masyarakat tidak dapat terukur dengan baik; • Tidak tersedia bukti sah tentang bahan ajar yang memanfaatkan hasil PKM; • Terdapat publikasi dari dosen yang sudah terpublis di jurnal internasional bereputasi namun telah discontinue. <p>Standar Isi PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Pengabdian DTSP yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu; • Isi dari kegiatan PKM Belum terdapat Join Research dengan Mitra LN. <p>Standar Proses PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi Ilmu Hukum Belum memiliki Road Map Pengabdian; • Mahasiswa masih kurang di ibatkan dalam proses Pengabdian; • Monev kegiatan pengabdian Belum dilakukan di program studi; • Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan belum dimiliki prodi Hukum. <p>Standar Penilaian PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Pedoman Pengabdian di Prodi Ilmu Hukum • Tidak dilakukan Sosialisasi Pedoman pengabdian kepada DTSP • Survey kepuasan untuk ketercapaian PKM tidak dilaksanakan • Belum ada pengabdian mutli disiplin <p>Standar Pelaksana PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada Road map PKM di Prodi Ilmu Hukum; • Tidak ada Kelompok Riset yang dibentuk baik di tingkat prodi maupun fakultas. <p>Sapras PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi Ilmu Hukum Tidak berlangganan Jurnal nasional terakreditasi termasuk E-journal; • Prodi Ilmu Hukum Tidak berlangganan Jurnal Internasional terakreditasi termasuk E-journal; • Tidak melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana.
--	--	--

19	Kesehatan Masyarakat	<p>Kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Studi masih menggunakan kurikulum tahun 2015. • kurikulum tersedia di ruang prodi, tetapi belum memiliki kelengkapan lembar pengesahan, belum memuat University Value, belum disusun dengan langkah-langkah yang seharusnya dan belum memuat mata kuliah universitas (MK. Kebencanaan) yang telah disepakati dalam workshop kurikulum di tingkat universitas tahun 2021. • Penyusunan kurikulum terbaru tidak melibatkan tim ahli dan stakeholder eksternal. <p>Standar kompetensi lulusan : Kurikulum yang terdapat di Program studi yaitu kurikulum KKNi Tahun 2015 dan untuk kurikulum OBE tahun 2021 masih dalam penyelesaian, dimana Capaian pembelajaran pada kurikulum 80 % sesuai dengan profil lulusan dan belum menyesuaikan dengan Visi Misi prodi serta Peninjauan kurikulum yang dilaksanakan 6 tahun</p> <p>Standar Isi Pembelajaran : Pada dokumen kurikulum program studi Tidak terdapat kedalaman dan keleluasan materi pembelajaran yang mengacu pada KKNi sehingga prodi masih perlu melakukan peninjauan kembali bahan kajian agar tercapainya CPL yang diharapkan. Kurang dari 40% Kurikulum program studi memiliki komposisi 15% mata kuliah perguruan tinggi, 15% Mata kuliah fakultas dan 70% mata kuliah program studi karena lebih mendominasi mata kuliah dari asosiasi. Standar Proses Pembelajaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua dosen masih menggunakan RPS lama. • RPS masih banyak yang belum diperbaharui yang disesuaikan dengan SN DIKTI. • RPS mata kuliah yang tersedia tidak menggunakan format yang seragam. • Dosen tidak mengumpulkan RPS di awal pelaksanaan semester. <p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butir Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif, (2) otentik, (3) objektif, (4) akuntabel, dan (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi
----	-----------------------------	---

		<p>tidak terlaksana. Hal ini dilihat dari tidak adanya kontrak belajar yang tertulis, kesepakatan penilaian hanya disampaikan secara lisan, dan hasil belajar tidak dapat diakses secara dari melalui SIMAK Unismuh Palu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PPS mengumumkan hasil yudisium kepada mahasiswa secara manual dan terdokumentasi dalam bentuk SK yudisium, kedepannya perlu ditingkatkan dengan menggunakan sistem online dalam mengumumkan yudisium agar lebih terpublikasi. <p>Standar Dosen dan Tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS lebih kecil dari 30%, yaitu 11%, jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK harus sama dengan atau lebih besar dari 30%. tidak memiliki DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTPS. DTPS dengan jabatan akademik GB harus sama dengan atau lebih besar dari 15%. • tidak terdapat DTPS yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional (PDKII). UPPS harus mengusulkan DTPS untuk menjadi anggota bidang ilmu pada level internasional. • dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 (TOEFL500) lebih kecil dari 20%, DTPS harus mengusulkan DTPS untuk mengikuti TOEFL. • beban dosen dalam membimbing tugas akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester rata-rata lebih dari 10 bimbingan/mahasiswa, hal ini melebihi ketentuan maksimal dalam permenristekdikti, sehingga UPPS mengupayakan agar melakukan pengusulan jabatan lektor untuk mengurangi beban dosen dalam membimbing. • persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun (PDHAKI) hanya 5 DTPS atau setara 5%, UPPS harus mendorong DTPS untuk menghasilkan KI • Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya (PDJIR) hanya terdapat 3 DTPS, UPPS harus mendorong DTPS untuk menulis di jurnal internasional/bereputasi. • Tidak terdapat persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen, yang
--	--	---

		<p>berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat (LRPkMRI), UPPS harus mendorong DTSPS untuk menghasilkan luaran dengan rekognisi internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi (KKTK) hanya terdapat tendik operator dan administrasi, UPPS harus menyediakan tendik dengan kualifikasi pustakawan, laboran, programmer. • programmer/operator belum memiliki sertifikat kompetensi (TKSK), UPPS harus mengusulkan tendik untuk mengikuti tes kompetensi. • Terdapat 1 tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun (PTKP), UPPS mendorong seluruh tendik untuk mengikuti pelatihan • tidak tersedia laporan persentase kepuasan mahasiswa terhadap kinerja Dosen (KMKD), UPM harus membuat laporan hasil kepuasan berdasarkan survey yang dibagikan. • Tidak tersedia laporan persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan (KMLTK), UPM harus membuat laporan hasil kepuasan berdasarkan survey yang dibagikan. • Sekitar 80% atau setara dengan perolehan 2 poin, unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. <p>Standar Sapr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas ruang perpustakaan memiliki luas <200 m², tidak memiliki AC, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa >1 : 100 atau setara dengan perolehan 0 poin, UPPS harus menyediakan ruang perpustakaan yang layak bagi mahasiswa • Tidak tersedia ruang pelayanan kesehatan, UPPS harus menyediakan ruang pelayanan kesehatan. • terdapat 1 ruang kerja dosen (LRD) yang ditempati oleh beberapa dosen sekaligus, UPPS harus menyediakan ruang kerja per dosen. • Tidak tersedia bahan pustaka berupa jurnal
--	--	---

		<p>internasional bereputasi, UPPS harus menyediakan jurnal internasional bereputasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanya tersedia sarana IT dan Sistem informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning dan sistem informasi akademik, UPPS harus menyediakan sistem informasi untuk e-library dan e-repository. • Tidak tersedia perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus, UPPS harus menyediakan akses mahasiswa berkebutuhan khusus. • tidak tersedia laporan indek kepuasan civitas akademika (IKCA) terhadap layanan sarana dan prasarana pada skala 1 – 4, UPM harus membuat laporan hasil kepuasan. • tidak terlaksana hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran (HASP), UPM harus melaksanakan audit sarana dan prasarana. • tidak tersedia laporan kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran/Persentase mahasiswa sangat puas (MSP), UPM harus membuat laporan survey kepuasan. • tidak tersedia tingkat kunjungan (TKj) e-library perpustakaan mahasiswa dan dosen karena tidak tersedia e-library. <p>Standar Isi Penelitian tidak ada jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional, Jumlah buku yang dirujuk (Terbitan 5 tahun terakhir), Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary), Isi/tema penelitian mengantisipasi permasalahan global, Isi/ tema penelitian dilakukan join riset dengan mitra LN, kedepannya 30% dicantumkan pada isi penelitian</p> <p>Sapras Penelitian Pada saat menelaah dokumen di prodi kesehatan masyarakat, universitas muhammadiyah palu, < 55, untuk memenuhi kepuasan stakeholder terhadap sarana prasarana kepuasan stakeholder terhadap sarana prasarana minimal sebesar 75-84%</p> <p>Standar Pelaksana Penelitian Tidak ada dokumen Renstra penelitian yang memuat roadmap penelitian, SOP penelitian dan tidak ada dana sharing penelitian</p> <p>Standar Hasil PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PPS tidak memiliki laporan survey baik dari
--	--	--

		<p>Dosen pelaksana PKM maup[un UPM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya integrasi PKM dalam Pembelajaran (Bahan ajar) • Tidak adanya HKI yang diterapkan di masyarakat • Tidak adanya publikasi PKM terindeks Scopus • UPPS/PPS hanya memiliki satu publikasi artikel PKM • UPPS/PPS hanya memiliki 1 HKI PKM dalam 3 tahun terakhir <p>Standar Isi PKM UPPS/PPS memiliki 8 Judul PkM Dosen dengan data persentase sebesar 68%-84% PkM yang memberdayakan masyarakat</p> <p>Standar Proses PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • PkM yang dilaksanakan tidak sesuai dengan alur yang ada dalam panduan PkM • PkM tidak dimulai dengan proposal • UPP/PPS tidak memiliki Roadmap PkM • Terdapat 3 dosen yang melakukan PkM di lingkup persyarikatan (TK Aisyiyah) • PkM tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan panduan dan SOP <p>Standar Penilaian PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proposal dan hasil PkM tidak direview dan didiseminasikan • Mayoritas PkM tidak memenuhi syarat administrasi sesuai pedoman <p>Standar Pelaksana PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada dosen yang memiliki roadmap PkM • LPPM tidak memiliki kelompok riset • Kegiatan PkM Dosen melibatkan mahasiswa namun tidak mencantumkan nama mereka di surat tugas / SK (minor) <p>Sapras PKM Terdapat ≤ 40 judul buku /e-book dan terdapat 1 jurnal sinta 4</p> <p>Standar Pengelolaan PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan PkM tidak dilaporkan dengan periodic dan tidak terdokumentasi • Tidak terdapat monev dan diseminasi hasil PkM • Tidak ada reviewer internal/eksternal' • UPPS/PPS Tidak menyediakan dana PkM internal yang memadai
--	--	---

3.2. Rekomendasi Perbaikan Standar Mutu Yang Belum Tercapai

No	Program Studi	Rekomendasi Perbaikan
(1)	(2)	(3)
1	PIAUD	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan Program Studi membentuk Unit Penjaminan Mutu di tingkat fakultas (jika memungkinkan sampai pada tingkat program studi – Gugus Penjaminan Mutu). Unit ini yang kemudian akan berkoordinasi dengan LPM dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mutu di tingkat fakultas dan prodi. Pembentukan Unit Penjaminan Mutu ini direncanakan terlaksana paling lambat satu semester. • Program Studi memperbaiki dokumen kurikulum dan melakukan peninjauan kurikulum setiap tahun dan revisi kurikulum maksimal empat tahun sekali. Struktur Mata Kuliah Prodi akan memuat Mata Kuliah universitas yang telah disepakati yakni: MK. Kebencanaan, MK. Kewirausahaan Islami, MK. Anti Korupsi. • Pimpinan Program Studi mensosialisasikan format RPS yang berlaku di universitas kepada seluruh dosen program studi. • Pimpinan Program Studi melalui rapat distribusi mata kuliah, menyampaikan kepada dosen pengampu MK untuk memperbaharui RPS di setiap semester. • Pimpinan Program Studi mengumpulkan RPS dari dosen pengampu mata kuliah paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai. • Pimpinan Program Studi memetakan kerjasama internasional yang bisa direalisasikan dalam bentuk kegiatan. • Pimpinan Program Studi mendokumentasikan laporan kegiatan kerjasama yang telah terlaksana. • Pimpinan Program Studi mensosialisasikan Format Kontrak Perkuliahan yang bisa digunakan oleh dosen untuk melakukan kesepakatan penilaian yang terdokumentasi dengan baik (Kontrak perkuliahan diserahkan ke Prodi pada minggu ke-dua perkuliahan) • Pimpinan Program Studi berkoordinasi aktif dengan operator SIMAK agar semua mahasiswa dapat memasukkan KRS sebelum perkuliahan dimulai sehingga hasil capaian belajar di akhir

		<p>semester dapat diunggah oleh dosen/Prodi/operator dan dapat diakses oleh mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan Pimpinan Program Studi memetakan kompetensi dosen dan kebutuhan dosen program studi agar setiap dosen memiliki latar belakang yang sesuai.. • Pimpinan Program Studi melakukan pemetaan Dosen dengan Jafung agar dapat menjadi penanggung jawab mata kuliah yang terjadwal setiap semester. • Pimpinan Program Studi melakukan pemetaan dosen yang belum memiliki jafung dan memfasilitasi proses pemerolehan jafung dosen. • Pimpinan Program Studi memotivasi dosen tetap untuk melengkapi persyaratan sertifikasi mulai dari mengirim dosen untuk mengikuti Pekerti dan AA, juga memantau terbukanya slot PLTI untuk dosen yang belum memiliki Nilai TOEP dan TPA. • UPPS dan Pimpinan Program Studi menjembatani keikutsertaan dosen dalam asosiasi bidang keilmuan dengan aktif memberikan informasi yang diperoleh terkait keanggotaan asosiasi. • Pimpinan Program Studi mendokumentasikan secara lengkap BKD dosen setiap semesternya sehingga mudah diakses di ruang prodi. • Pimpinan Program Studi memaksimalkan penggunaan SIMAK dengan melakukan koordinasi yang baik dengan operator agar KRS dan KHS mahasiswa dapat diakses, memastikan bahwa mahasiswa yang mengikuti perkuliahan adalah mereka yang telah mengisi SIMAK. • Pimpinan Prodi dan UPPS melaksanakan pelatihan SPADA kembali secara intensif dengan melibatkan semua dosen agar dosen bisa mendokumentasikan semua bahan ajar dan proses pembelajaran di Spada. • UPPS, Pegawai Perpustakaan, dan Pimpinan Program Studi melakukan pendataan lengkap sumber pustaka sesuai dengan program studi, menambah sumber pustaka dengan memaksimalkan mengunduh jurnal-jurnal bereputasi yang dapat diakses secara bebas • Pimpinan Program Studi didukung UPPS dan bekerja sama dengan Prodi lain menyusun Panduan Bimbingan Akademik dan Panduan Pengembangan Suasana akademik.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Program Studi mensosialisasikan Tupoksi Dosen PA sebagai pengarah dan pembimbing mahasiswa dalam hal akademik (jika memungkinkan juga non-akademik yang memberi pengaruh pada pencapaian akademik mahasiswa). • Pimpinan Program Studi menyediakan kartu bimbingan akademik dan mengaktifkan kembali penggunaan kartu kontrol bimbingan skripsi sehingga frekuensi bimbingan mahasiswa dapat dipantau dan terdokumentasi dengan baik.. • Pimpinan Program Studi menjembatani pembentukan Himpunan Mahasiswa di tingkat prodi. • Pimpinan Program Studi mensosialisasikan keberadaan panduan penelitian yang berlaku di universitas. • Pimpinan Program Studi memetakan DPTS yang belum memiliki akun Google Scholar dan Sinta serta memfasilitasi pembuatan akun yang bersangkutan. • UPPS dan Pimpinan Program Studi berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait penyusunan Peta Jalan Penelitian baik di tingkat fakultas, program studi, hingga ke Dosen Tetap Program Studi. • Pimpinan Program Studi memastikan keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dosen melalui pemantauan dan dokumentasi Perjanjian Kerja Penelitian. • Pimpinan Program Studi memetakan kebutuhan bahan pustaka penelitian berupa buku, prosiding, jurnal internasional dan nasional berreputasi dan berkoordinasi dengan Wakil Dekan II dalam pengadaannya dalam bentuk softcopy dan hardcopy agar dapat memfasilitasi kebutuhan Dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran dan penelitian. • Pimpinan Program Studi, melalui rapat program studi, menyampaikan pentingnya <i>pelaksanaan</i> kegiatan PkM secara melembaga sehingga kegiatan terdokumentasi dengan baik. • Pimpinan Program Studi menjembatani Dosen dengan LPPM agar semua kegiatan PkM dapat terlaksana dan tercatat dengan baik. • UPPS bersama Pimpinan Program Studi berkonsultasi dengan LPPM terkait penyusunan Roadmap (Peta jalan) PkM Fakultas, Prodi dan
--	--	--

		<p>Dosen bersesuaian dengan Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat universitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Program Studi di bawah pengawasn Wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama melakukan review proposal PkM dan mengingatkan dosen agar melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM Dosen dan hal tersebut didokumentasikan dalam bentuk kontrak kerja mahasiswa dan ditandatangani.
2	HES	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan Program Studi membentuk Unit Penjaminan Mutu di tingkat fakultas (jika memungkinkan sampai pada tingkat program studi – Gugus Penjaminan Mutu). Unit ini yang kemudian akan berkoordinasi dengan LPM dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mutu di tingkat fakultas dan prodi • Program Studi memperbaiki dokumen kurikulum dan melakukan peninjauan Kembali kurikulum setiap tahun dan revisi kurikulum maksimal empat tahun sekali. Struktur Mata Kuliah Prodi akan memuat Mata Kuliah universitas yang telah disepakati sesuai SK Rektor tentang Kurikulum Universitas • Pimpinan Program Studi mengumpulkan RPS dari dosen pengampu mata kuliah paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai. • Pimpinan Program Studi terus mensosialisasikan format RPS yang berlaku di universitas kepada seluruh dosen program studi. • Pimpinan Program Studi melalui rapat distribusi mata kuliah, menyampaikan kepada dosen pengamppu MK untuk memperbaharui RPS di setiap semester. • Pimpinan Program Studi merencanakan dan menindaklanjuti hasil kesepakatan sesuai dgn institusi yang terkait • Pimpinan Program Studi mendokumentasikan laporan kegiatan kerjasama yang telah terlaksana • Pimpinan Program Studi mensosialisasikan Format Kontrak Perkuliahan yang bisa digunakan oleh dosen untuk melakukan kesepakatan penilaian yang terdokumentasi dengan baik (Kontrak perkuliahan diserahkan ke Prodi pada minggu ke-dua perkuliahan). • Pimpinan Program Studi dapat menerbitkan kartu control Kartu Bimbingan Akademik maupun

		<p>Skripsi sehingga dapat terpantau proses pembimbingan mahasiswa kepada dosen PA dan Dosen Pembimbing Skripsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan Pimpinan Program Studi memetakan kompetensi dosen dan kebutuhan dosen program studi agar setiap dosen memiliki latar belakang yang sesuai.. • Pimpinan Program Studi memasukkan Dosen memiliki Jafung agar dapat menjadi penanggung jawab mata kuliah yang terjadwal setiap semester. • Pimpinan Program Studi mengusulkan dosen yang belum memiliki jafung dan memfasilitasi proses pemerolehan jafung dosen. • Pimpinan Program Studi memotivasi membantu dan memudahkan proses dosen tetap untuk melengkapi persyaratan sertifikasi mulai dari mengirim dosen untuk mengikuti Pekerti dan AA dan lainnya. • UPPS dan Pimpinan Program Studi menjembatani keikutsertaan dosen dalam asosiasi bidang keilmuan dengan aktif memberikan informasi yang diperoleh terkait keanggotaan asosiasi. • Pimpinan Program Studi mendokumentasikan secara lengkap BKD dosen setiap semesternya sehingga mudah diakses di ruang prodi. • Pimpinan Program Studi memaksimalkan penggunaan SIMAK dengan melakukan koordinasi yang baik dengan operator agar KRS dan KHS mahasiswa dapat diakses, memastikan bahwa mahasiswa yang mengikuti perkuliahan adalah mereka yang telah mengisi SIMAK. • Pimpinan Prodi dan UPPS melaksanakan pelatihan SPADA kembali secara intensif dengan melibatkan semua dosen agar dosen bisa mendokumentasikan semua bahan ajar dan proses pembelajaran di Spada. • UPPS, Pegawai Perpustakaan, dan Pimpinan Program Studi melakukan pendataan lengkap sumber pustaka sesuai dengan program studi, menambah sumber pustaka dengan memaksimalkan mengunduh jurnal-jurnal bereputasi yang dapat diakses secara bebas. • Pimpinan Prodi dan UPPS Menyusun dan mendokumentasikan Roadmap penelitian dan PkM dapat berkonsultasi pada Lembaga LPPM serta melibatkan semua dosen
--	--	--

3	PAI	Membutuhkan komitmen dalam penyesuaiannya yang akan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dari bulan Oktober 2022 – bulan Februari 2023
4	AS	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan Program Studi membentuk Unit Penjaminan Mutu di tingkat fakultas (jika memungkinkan sampai pada tingkat program studi – Gugus Penjaminan Mutu). Unit ini yang kemudian akan berkoordinasi dengan LPM dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mutu di tingkat fakultas dan prodi. Pembentukan Unit Penjaminan Mutu ini direncanakan terlaksana paling lambat satu semester. • Program Studi memperbaiki dokumen kurikulum dan melakukan peninjauan kurikulum setiap tahun dan revisi kurikulum maksimal empat tahun sekali. Struktur Mata Kuliah Prodi akan memuat Mata Kuliah universitas yang telah disepakati yakni: MK. Kebencanaan, MK. Kewirausahaan Islami, MK. Anti Korupsi. • Kurikulum yang telah disusun oleh prodi disosialisasikan kepada Dosen tetap prodi sehingga memudahkan dalam penyusunan RPS • Prodi perlu melakukan perbaikan RPS dan dikumpulkan sebelum H-7 sebelum dilakukan perkuliahan. • Prodi perlu menjalin kerjasama dibuktikan dengan MOU dan laporan kerjasama baik nasional maupun Internasional • Pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran belum berjalan dengan baik dikarenakan belum terbentuknya UPPS sehingga sebaiknya Prodi yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan setiap semester • Prodi mengaktifkan dalam pemanfaatan simak dalam terkait pemberian nilai sehingga nilai dan KHS dapat diakses dengan online dan di arsipkan pula di program studi • Prodi perlu mengusulkan penambahkan dosen tetap program studi (DTPS) yang serumpun ilmu sesuai Standar pembentukan awal prodi yakni minimal 5 orang DTPS. • Mendorong dosen-dosen prodi untuk segera mengurus jabatan fungsional dan belum menggunakan sebagai penanggung jawab mata kuliah

		<ul style="list-style-type: none"> • Memotivasi dosen tetap prodi untuk terlibat aktif didalam asosiasi. • Prodi melakukan pelatihan kembali kepada dosen-dosen dalam hal penggunaan SPADA dan SIMAK agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. • Prodi berlangganan Jurnal Online sehingga dapat menambah bahan pustaka berupa artikel/jurnal/prosiding tidak hanya menggunakan buku sebagai referensi • Prodi sebaiknya memiliki Jurnal Online berlangganan sehingga dapat menambah bahan pustaka berupa artikel/jurnal/prosiding tidak hanya menggunakan buku yang digunakan sebagai referensi dari tulisan-tulisan atau riset dosen dan mahasiswa. • memantau aktifitas mahasiswa baik dalam proses akademik mau pun dalam bimbingan skripsi. • Mendorong peningkatan minat dan bakat mahasiswa dengan mengaktifkan/membentuk himpunan mahasiswa/UKM (unit kegiatan mahasiswa) • Prodi perlu melakukan peningkatan kapasitas dosen tetap prodi didalam merujuk penelitian dan publikasi penelitian dengan membuat workshop / pelatihan Mendeley dan Zotero • Prodi perlu membuat dan mensosialisasikan panduan penelitian ke dosen-dosen • Mendorong dosen tetap prodi untuk membuat kerangka berpikir atau roadmap penelitian sesuai bidang/kajian keilmuannya, selain itu melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. • Mendorong kepada setiap DT/PS untuk melibatkan mahasiswa didalam pelaksanaan penelitian dan mengintegrasikannya kepada pembelajaran, sehingga hasil penelitian berupa jurnal, prosiding dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa tingkat akhir. • Mendorong kepada setiap dosen tetap program studi agar melakukan PkM yang melembaga serta menambah jurnal online berlangganan agar menambah referensi bahan pustaka • Prodi perlu mendorong dosen-dosen untuk melaksanakan PKM selain itu pula memanfaatkan fasilitas perpustakaan sebagai sarana penelusuran artikel terkait pengembangan penelitian
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Prodi perlu mendorong keterlibatan mahasiswa didalam pelaksanaan PkM baik yang PkM mandiri maupun Hibah PkM sehingga menjadi wadah ataupun inspirasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi akhirnya.
5	Magister Pendidikan Islam	<ul style="list-style-type: none"> • UPPs perlu menetapkan kebijakan dalam keterlaksanaan serta keberkayaan suasana akademik tersebut. • UPPs perlu membuat buku panduan/dokumen yang dimaksud untuk melengkapi dokumen/panduan/pedoman tingkat fakultas. • PPs perlu mendorong dosen di tingkat prodi untuk mengumpulkan RPS sesuai dengan mata kuliah yang diampu, baik dalam bentuk file maupun dokumen (hard copy). • PPs perlu melakukan pengembangan dalam berbagai metode pembelajaran. • UPPS/PPs perlu mengembangkan jejaring Kerjasama khususnya dengan negara-negara luar. • PPS perlu melaksanakan peninjauan kurikulum minimal 2 tahun sekali maksimal 4 tahun sekali. • PPs perlu mencari informasi tentang Asosiasi Magister Manajemen Pendidikan Islam guna memperoleh informasi mata kuliah asosiasi. • PPs harus menyampaikan kepada seluruh dosen prodi untuk mengintegrasikan seluruh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran. • PPs perlu berkoordinasi ke tingkat universitas agar memperoleh informasi hasil tracer studi. Hal ini dipandang perlu mengingat melalui tracer study universitas dapat mengetahui sebaran alumni atau lulusan yang terserap ke dunia kerja, selain itu hal ini juga sebagai evaluasi perguruan tinggi terhadap lulusan yang dihasilkan apakah telah memenuhi Standar kompetensi yang sesuai pada dunia kerjanya yang nantinya berkorelasi terhadap pengembangan kurikulum yang ada. • UPPs perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar mahasiswa calon lulusan bisa memiliki

		<p>sertifikat kompetensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPS perlu memacu mahasiswa dalam pembuatan karya intelektual yang dimaksud • PPS perlu membuat suatu terobosan dalam prodi agar dapat menjadi daya tarik dari prodi, serta PPS perlu menyesuaikan dengan Universitas Value yang ada. • PPs perlu melakukan pengukuran dengan metode yang sah dan relevan, menggambarkan (1)keserbacakupan, (2) kedalaman, dan (3) kebermanfaatn analisis. • UPPS dan PPS harus mendorong lebih banyak lagi DTPS untuk menjadi anggota bidang ilmu pada level nasional dan juga pada level internasional. Anggota bidang ilmu yang dimaksud adalah keanggotaan asosiasi atau bidang ilmu yang relevan • UPPS dan PPS harus mendorong DTPS untuk mengikuti TOEFL dengan memiliki skor minimal 500. Dalam prosesnya, ketika skor yang ditargetkan belum bisa tercapai, maka sebagai bentuk peningkatan kemampuan berbahasa Inggris maka DTPS diharapkan dapat mengikuti kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Universitas Muhammadiyah Palu. • UPPS harus mengusul ke tingkat universitas terkait kebutuhan operator tetap di fakultas. Pengusulan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan jenis pekerjaannya sebaiknya dilakukan, mengingat sistem administrasi terkait dosen maupun mahasiswa selalu mengalami perubahan atau perkembangan. • UPPS dan PPS membentuk Unit Penjaminan Mutu di tingkat fakultas bahkan jika memungkinkan untuk membentuk penjaminan sampai pada tingkat program studi GPM/GKM. Nantinya UPM pada tingkat fakultas yang akan berkoordinasi dengan LPM dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mutu di tingkat fakultas serta program studi. • UPPS harus menyediakan ruang perpustakaan yang layak bagi mahasiswa di lingkungan fakultas. Menyediakan lebih banyak lagi buku teks/referensi yang relevan dengan program studi yang ada di fakultas. Selain itu, UPPS sekiranya dapat menyediakan jurnal berlangganan baik akreditasi nasional maupun internasional bereputasi sebagai sumber referensi yang diletakkan di
--	--	---

		<p>perpustakaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPS harus menyediakan dokumen lengkap kebijakan terkait penelitian dan pengabdian serta telah disosialisasikan, dilaksanakan dan dievaluasi dan ditindaklanjuti. • Sebaiknya melakukan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri, sehingga dapat tercantum dalam produktivitas penelitian dan pengabdian dosen, serta sebaiknya membuat artikel ilmiah dan dimuat dalam jurnal internasional baik terindeks Scopus maupun tidak terindek. Dosen sebaiknya melaksanakan PKM agar Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat, publikasi scopus atau setara per dosen per 3 tahun, unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun dan Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun, dapat tercantum pada aspek hasil PKM (Audit Mutu Internal PTMA
6	Magister Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS perlu menetapkan kebijakan dalam keterlaksanaan dan keberkalaan suasana akademik tersebut • Untuk menunjang proses pembelajaran dan membangun suasana akademik maka prodi harus memiliki dokumen terkait kebijakan suasana akademik • Prodi harus membuat aturan jelas terkait pembimbing akademik untuk jenjang S2 • UPPS mengajukan SDM untuk menduduki GKM tersebut. • Prodi wajib memiliki RPS yang sesuai dengan mata kuliah • Prodi melakukan pengembangan dalam berbagai metode pembelajaran • UPPS/PPs perlu mengembangkan jejaring Kerjasama khususnya dengan negara-negara luar • PPS perlu melaksanakan peninjauan kurikulum minimal 2 tahun sekali maksimal 4 tahun sekali. • PPS perlu mencari informasi tentang Asosiasi Magister hukum guna memperoleh informasi mata kuliah asosiasi. • pps menyampaikan kepada seluruh dosen prodi untuk mengintegrasikan seluruh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.

	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi melakukan perumusan materi pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI • Prodi tetap melakukan pendataan terhadap semua mahasiswa • pps perlu berkoordinasi di Universitas agar memperoleh informasi hasil tracer studi. • UPPs perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar mahasiswa calon lulusan bisa memiliki sertifikat kompetensi. • Prodi memfasilitasi dosen yang akan mengikuti ujian TOEFL • pps perlu memacu mahasiswa dalam pembuatan karya intelektual yang menunjang proses pembelajaran • pps perlu menyesuaikan dengan Universitas Value yang ada. • pps perlu membuat suatu terobosan dalam prodi agar dapat menjadi daya Tarik dari prodi. • PPs perlu melakukan pengukuran dengan metode yang sah dan relevan, menggambarkan (1) keserbacakupan, (2) kedalaman, dan (3) kebermanfaatannya analisis. • PPs perlu melakukan pengukuran dengan metode yang sah dan relevan, menggambarkan (1) keserbacakupan, (2) kedalaman, dan (3) kebermanfaatannya analisis. • Prodi menyediakan E-book dan hard copy, yang dapat menunjang dosen dalam memperoleh referensi dalam proses akademik • Program studi mendorong DTSP untuk melakukan pengusulan jabatan akademik LK • Program studi mendorong DTSP untuk melakukan pengusulan jabatan akademik GB • Program studi mendorong DTSP untuk melakukan pengusulan jabatan akademik GB • UPPS harus mengusulkan DTSP untuk menjadi anggota bidang ilmu pada level internasional • UPPS harus mengusulkan lebih banyak lagi DTSP untuk menjadi anggota bidang ilmu pada level nasional • UPPS harus mengusulkan DTSP untuk mengikuti TOEFL. • UPPS harus mendorong DTSP untuk menulis di jurnal internasional/bereputasi.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS harus mendorong DTSPS untuk berkegiatan tridharma di kampus lain. • UPPS harus mendorong DTSPS untuk menghasilkan luaran dengan rekognisi internasional lebih banyak lagi. • Program studi menyediakan operator yang dapat mendukung proses pembelajaran • Program studi harus mengusulkan tendik untuk mengikuti tes kompetensi. • PS mengikutsertakan tenaga kependidikan dalam kegiatan pelatihan sesuai kebutuhan prodi dan sesuai kompetensi tenaga kependidikan • UPPS harus membentuk UPM/GKM. • PS menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran • PS memenuhi sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran • UPPS harus menyediakan ruang perpustakaan yang layak bagi mahasiswa • UPPS harus menyediakan ruang pelayanan kesehatan • UPPS harus melakukan pengadaan buku teks lebih banyak lagi. • UPPS harus menyediakan jurnal akreditasi nasional. • UPPS harus menyediakan jurnal internasional bereputasi. • Prodi menyediakan dokumen lengkap kebijakan terkait penelitian dan telah disosialisasikan, dilaksanakan dan dievaluasi dan ditindaklanjuti • Prodi harus memiliki RG dan RM yang relevan dengan VMTS PS, sehingga dosen dapat melakukan penelitian berdasarkan RM penelitian. • Dosen sebaiknya melakukan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar Negeri, sehingga dapat tercantum dalam produktivitas penelitian dosen • semua dosen sebaiknya membuat artikel ilmiah dan dimuat dalam jurnal internasional baik terindeks Scopus maupun tidak terindek • Prodi mengembangkan dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang dapat memenuhi hasil riset perprodi pertahun. • Prodi menyediakan sarana dan prasarana serta laboratorium penelitian yang dapat menunjang
--	--

		<p>memenuhi kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi menyediakan dokumen lengkap kebijakan terkait pengabdian dan telah disosialisasikan, dilaksanakan dan dievaluasi dan ditindaklanjuti • Semua dosen melaksanakan kegiatan PKM dengan melibatkan mahasiswa • Prodi mendorong dosen terkait pengayaan bahan ajar dan penerbitan HKI berdasarkan hasil PKM • Setiap dosen mempunyai road map PkM, dan program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun, agar dapat tercantum pada aspek pelaksanaan PKM • Prodi menyediakan E-book dan hard copy, yang dapat menunjang dosen dalam memperoleh referensi dalam proses akademik.
7	PG-PAUD	<ul style="list-style-type: none"> • PPS melakukan analisis pemenuhan CPL dengan memenuhi 3 aspek yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Kecerbucukupan b. Kedalaman dan c. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan • PPS menyiapkan dokumen apabila dilakukan peninjauan CPL • PPS perlu menyelesaikan kelengkapan dokumen tentang “academic excellence” yang meliputi data tentang daya tarik program studi, kinerja dosen, kualitas lulusan • UPPS perlu membuat kebijakan untuk pembuatan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran • PPS perlu memiliki personal certification yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) • PPS perlu memotivasi mahasiswa program sarjana untuk mengikuti MSIB (MBKM) yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional • PP melakukan Tracer Studi dan membuat laporan • PPS mensosialisasikan kepada dosen-dosen untuk mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran sebagai upaya pengembangan keilmuan setiap tahun akademik

	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi seharusnya memiliki dokumen mekanisme penyusunan kurikulum seperti notulen rapat dan lain sebagainya • UPS mengupayakan adanya kerjasama internasional • PPS mewajibkan semua dosen pengampu mata kuliah memasukkan RPS sebelum perkuliahan dimulai mulai tahun akademik selanjutnya • PPS mengupayakan RPS bisa diakses terbuka oleh mahasiswa • PPS mengintruksikan kepada dosen pengampu mata kuliah yang belum melakukan penilaian berdasarkan 5 prinsip untuk tahun akademik selanjutnya melakuakn penilaian berdasarekan 5 prinsip tersebut. • Pimpinan fakultas dan prodi wajib memfasilitasi dan menginstruksikan dosen yang belummemiliki jabatan fungsional untuk segera mengurus kepangkatannya • UPS memotivasi dan memfasilitasi Dosen untuk mengikuti Pendidikan S3 • UPS menyiapkan Pedoman pembimbingan akademik dan kebijakan tertulis tentang suasana akademik untuk tahun akademik selanjutnya • PPS melakukan tindak lanjut dari evaluasi yang dilaksanakan • UPS memfasilitasi PPS untuk peningkatan Publikasi internasional dan nasional,serta hilirisasi hasil penelitian DTSP • Unit bisnis menjadi peluang untuk pengembangan mahasiswa dan menjadi peluang kerjasama dengan pihak luar, sehingga perlu segera melakukan MOU disertai kegiatan-kegiatan tindak lanjut lainnya • Perlunya peningkatan kemampuan penelitian terkait isi penelitian dengan meningkat jumlah rujukan (jurnal dan buku), isi atau tema penelitian mengantisipasi permasalahan global • UPS berkoordinasi dengan pihak LPPM untuk melaksanakan Workshop terkait Road map penelitian yang membahas secara mendalam tentang roadmap penelitian dengan menghadirkan pakar dibidangnya • PPS berkoordinasi dengan LPPM terkait dokumen-dokumen Penilaian Penelitian • PPSi melakukan pertemuan-pertemuan yang kontinyu terkait peningkatan jumlah penelitian dosen dan melakukan koordinasi dengan Fakultas dan LP2M terkait Kelompok Riset • Fakultas membantu prodi dalam penyiapan dan
--	---

		<p>pengembangan Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Studi menginstruksikan untuk memasukkan hasil penelitian dalam bahan ajar • UPS memfasilitasi PPS untuk peningkatan bahan ajar, luaran PkM dan Haki • UPS berkoodinasi dengan LPPM untuk melakukan Pelatihan dan klinik proposal yang kontinyu • UPS berkoodinasi dengan LPPM untuk melaksanakan Workshop terkait Road map PkM yang membahas secara mendalam tentang roadmap PKM dengan menghadirkan pakar dibidangnya
8	PNF	<ul style="list-style-type: none"> • PPS melakukan analisis pemenuhan CPL dengan memenuhi 3 aspek yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Keserbacukupan b. Kedalaman dan c. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan • PPS menyiapkan dokumen apabila dilakukan peninjauan CPL • PPS menyiapkan dokumen apabila dilakukan peninjauan CPL • UPPS perlu membuat kebijakan untuk pembuatan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran • PPS perlu memiliki personal certification yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) • PPS perlu memotivasi mahasiswa program sarjana untuk mengikuti MSIB (MBKM) yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional • PPS perlu menyelesaikan kelengkapan dokumen tentang “academic excellence” yang meliputi data tentang daya tarik program studi, kinerja dosen, kualitas lulusan • PPS menyiapkan Laporan jumlah lulusan yang merespon tracer Study. • PPS mensosialisasikan kepada dosen-dosen untuk mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran sebagai upaya pengembangan keilmuan setiap tahun akademik

		<ul style="list-style-type: none"> • Prodi seharusnya memiliki dokumen mekanisme penyusunan kurikulum seperti notulen rapat dan lain sebagainya dengan melibatkan alumni dan pengguna lulusan • UPS mengupayakan adanya kerjasama internasional • PPS mewajibkan semua dosen pengampu mata kuliah memasukkan RPS sebelum perkuliahan dimulai mulai tahun akademik selanjutnya • PPS mengupayakan RPS bisa diakses terbuka oleh mahasiswa • PPS mewajibkan kepada semua dosen pengampu mata kuliah untuk menyampaikan materi sesuai dengan RPS • Pimpinan fakultas dan prodi wajib memfasilitasi dan menginstruksikan dosen yang sudah bersyarat untuk naik ke lektor untuk segera mengurus keangkatannya • UPS memotivasi dan memfasilitasi Dosen untuk mengikuti Pendidikan S3 • UPS menyiapkan Pedoman pembimbingan akademik dan kebijakan tertulis tentang suasana akademik untuk tahun akademik selanjutnya • UPS memfasilitasi PPS untuk peningkatan Publikasi internasional dan nasional,serta hilirisasi hasil penelitian DTSP • Unit bisnis menjadi peluang untuk pengembangan mahasiswa dan menjadi peluang kerjasama dengan pihak luar, sehingga perlu segera melakukan MOU disertai kegiatan-kegiatan tindak lanjut lainnya • Perlunya peningkatan kemampuan penelitian terkait isi penelitian dengan meningkat jumlah rujukan (jurnal dan buku), isi atau tema penelitian mengantisipasi permasalahan global • PPS berkoordinasi dengan LPPM terkait dokumen-dokumen Penilaian Penelitian • PPSi melakukan pertemuan-pertemuan yang kontinyu terkait peningkatan jumlah penelitian dosen dan melakukan koordinasi dengan Fakultas dan LP2M terkait Kelompok Riset • Fakultas membantu prodi dalam penyiapan dan pengembangan Laboratorium • Program Studi menginstruksikan untuk memasukkan hasil penelitian dalam bahan ajar • UPS memfasilitasi PPS untuk peningkatan bahan ajar, luaran PkM dan Haki
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • UPS berkoodinasi dengan LPPM untuk melakukan Pelatihan dan klinik proposal yang kontinyu • UPS berkoodinasi dengan LPPM untuk melaksanakan Workshop terkait Road map PkM yang membahas secara mendalam tentang roadmap PKM dengan menghadirkan pakar dibidangnya
9	Bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> • PPS melakukan analisis pemenuhan CPL dengan memenuhi 3 aspek yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Kecerbaccukupan b. Kedalaman dan c. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan • PPS menyiapkan dokumen apabila dilakukan peninjauan CPL • PPS perlu menyelesaikan kelengkapan dokumen tentang “academic excellence” yang meliputi data tentang daya tarik program studi, kinerja dosen, kualitas lulusan • UPPS perlu membuat kebijakan untuk pembuatan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran • PPS perlu memiliki personal certification yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) • PPS mensosialisasikan kepada dosen-dosen untuk mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran sebagai upaya pengembangan keilmuan setiap tahun akademik • Prodi seharusnya memiliki dokumen mekanisme penyusunan kurikulum seperti notulen rapat dan lain sebagainya • UPS mengupayakan adanya kerjasama internasional • PPS mewajibkan semua dosen pengampu mata kuliah memasukkan RPS sebelum perkuliahan dimulai mulai tahun akademik selanjutnya • PPS mengupayakan RPS bisa diakses terbuka oleh mahasiswa • PPS mewajibkan kepada semua dosen pengampu mata kuliah untuk menyampaikan materi sesuai dengan RPS • PPS mengintruksikan kepada dosen pengampu mata

		<p>kuliah yang belum melakukan penilaian berdasarkan 5 prinsip untuk tahun akademii selanjutnya melakuakn penilaian berdasarekan 5 prinsip tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPS menyiapkan Pedoman pembimbingan akademik dan kebijakan tertulis tentang suasana akademik untuk tahun akademik selanjutnya • PPS melakukan tindak lanjut dari evaluasi yang dilaksanakan • UPS memfasilitasi PPS untuk peningkatan Publikasi internasional dan nasional,serta hilirisasi hasil penelitian DTSP • Unit bisnis menjadi peluang untuk pengembangan mahasiswa dan menjadi peluang kerjasama dengan pihak luar, sehingga perlu segera melakukan MOU disertai kegiatan-kegiatan tindak lanjut lainnya • Perlunya peningkatan kemampuan penelitian terkait isi penelitian dengan meningkat jumlah rujukan (jurnal dan buku), isi atau tema penelitian mengantisipasi permasalahan global • UPS berkoordinasi dengan pihak LPPM untuk melaksanakan Workshop terkait Road map penelitian yang membahas secara mendalam tentang roadmap penelitian dengan menghadirkan pakar dibidangnya • PPS berkoordinasi dengan LPPM terkait dokumen-dokumen Penilaian Penelitian • PPSi melakukan pertemuan-pertemuan yang kontinyu terkait peningkatan jumlah penelitian dosen dan melakukan koordinasi dengan Fakultas dan LP2M terkait Kelompok Riset • Fakultas membantu prodi dalam penyiapan dan pengembangan Laboratorium • Program Studi menginstruksikan untuk memasukkan hasil penelitian dalam bahan ajar • UPS memfasilitasi PPS untuk peningkatan bahan ajar, luaran PkM dan Haki • UPS berkoodinasi dengan LPPM untuk melakukan Pelatihan dan klinik proposal yang kontinyu • UPS berkoodinasi dengan LPPM untuk melaksanakan Workshop terkait Road map PkM yang membahas secara mendalam tentang roadmap PKM dengan menghadirkan pakar dibidangnya
10	IKOR	<ul style="list-style-type: none"> • PPS melakukan analisis pemeneuhan CPL dengan memenuhi 3 aspek yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Kesarbacukupan b. Kedalaman dan

		<p>c. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPS melakukan peninjauan CPL Minimal 3 tahun sekali berdasarkan kondisi internal dan eksternal • PPS perlu menyelesaikan kelengkapan dokumen tentang “academic excellence” yang meliputi data tentang daya tarik program studi, kinerja dosen, kualitas lulusan • UPPS perlu membuat kebijakan untuk pembuatan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran • PPS perlu memiliki personal certification yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) • PPS perlu memotivasi mahasiswa program sarjana untuk mengikuti MSIB (MBKM) yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional • PPS mensosialisasikan kepada dosen-dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran sebagai upaya pengembangan keilmuan setiap tahun akademik • Prodi seharusnya memiliki dokumen mekanisme penyusunan kurikulum seperti notulen rapat dan lain sebagainya • UPS mengupayakan adanya kerjasama internasional • PPS mensosialisasikan kepada dosen-dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran sebagai upaya pengembangan keilmuan setiap tahun akademik • PPS mensosialisasikan kepada dosen-dosen untuk mengintegrasikan AIK ke dalam proses pembelajaran. • Pengelola Gugus Penjaminan Mutu untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran • PPS mewajibkan semua dosen pengampu mata kuliah memasukkan RPS sebelum perkuliahan dimulai mulai tahun akademik selanjutnya • PPS mengintruksikan kepada dosen pengampu mata kuliah yang belum melakukan penilaian berdasarkan 5 prinsip untuk tahun akademii selanjutnya
--	--	---

		<p>melakuakn penilaian berdasarekan 5 prinsip tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan fakultas dan prodi wajib memfasilitasi dan menginstruksikan dosen yang belum memiliki jabatan fungsional untuk segera mengurus keangkatannya • UPS memotivasi dan memfasilitasi Dosen untuk mengikuti Pendidikan S3 • UPS menyiapkan Pedoman pembimbingan akademik dan kebijakan tertulis tentang suasana akademik untuk tahun akademik selanjutnya • Gugus penjaminan mutu melakukan Monev dan laporan Monev • UPS memfasilitasi PPS untuk peningkatan Publikasi internasional dan nasional,serta hilirisasi hasil penelitian DTSP • Unit bisnis menjadi peluang untuk pengembangan mahasiswa dan menjadi peluang kerjasama dengan pihak luar, sehingga perlu segera melakukan MOU disertai kegiatan-kegiatan tindak lanjut lainnya • Perlunya peningkatan kemampuan penelitian terkait isi penelitian dengan meningkat jumlah rujukan (jurnal dan buku), isi atau tema penelitian mengantisipasi permasalahan global • UPS berkoordinasi dengan pihak LPPM untuk melaksanakan Workshop terkait Road map penelitian yang membahas secara mendalam tentang roadmap penelitian dengan menghadirkan pakar dibidangnya • PPS berkoordinasi dengan LPPM terkait dokumen-dokumen Penilaian Penelitian • PPSi melakukan pertemuan-pertemuan yang kontinyu terkait peningkatan jumlah penelitian dosen dan melakukan koordinasi dengan Fakultas dan LP2M terkait Kelompok Riset • Fakultas membantu prodi dalam penyiapan dan pengembangan Laboratorium • Program Studi menginstruksikan untuk memasukkan hasil penelitian dalam bahan ajar • UPS memfasilitasi PPS untuk peningkatan bahan ajar, luaran PkM dan Haki • UPS berkoodinasi dengan LPPM untuk melakukan Pelatihan dan klinik proposal yang kontinyu • UPS berkoodinasi dengan LPPM untuk melaksanakan Workshop terkait Road map PkM yang membahas secara mendalam tentang roadmap PKM dengan menghadirkan pakar dibidangnya
--	--	--

11	<p style="text-align: center;">Ilmu Administrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Program Studi perlu melakukan perbaikan dokumen pada dokumen halaman kurikulum (daftar isi halaman kurikulum) • Pimpinan Program Studi perlu memperbaiki Misi Program Studi disesuaikan dengan Misi Universitas • Pimpinan Program studi perlu melaksanakan tracer study untuk mendapatkan umpan balik kepuasan pengguna • UPPS dan Pimpinan Program Studi perlu segera melakukan pertemuan dengan DTSP membahas integrasi penelitian dan PKM kedalam pembelajaran • Pimpinan Program Studi perlu melihat ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kelengkapan lainnya seperti bahan ajar • Pimpinan Program Studi perlu melaksanakan Monitoring dan evaluasi (Monev) Pembelajaran • Pimpinan Program Studi perlu melaporkan keberadaan sarana pembelajaran berupa infocus yang masih kurang kepada Wadep 2 • UPPS perlu mengadakan tenaga kepastakaan • Pimpinan Program studi perlu mengadakan unit bisnis dan mengembangkan kontrak kerja dengan pihak ketiga. • Pimpinan Program studi segera mendorong dosen untuk mengurus NIDN dan meningkatkan jabatan fungsional • Pimpinan Program Studi perlu mendorong DTSP untuk mengurus HAKI sehingga setiap tahun ada peningkatan perolehan Haki dari DTSP Prodi Administrasi Negara • meningkatkan jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan dan buku serta melakukan penelitian secara multi dan lintas ilmu, dan isi/tema penelitian mengantisipasi permasalahan global. • UPPS dan Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas MuhammadiyahPalu, segera berkoordinasi dengan LPPM terkait Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian dan mengarahkan DTSP agar isi penelitian terapan berorientasi pada inovasi serta pengembangan Iptek yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha atau industry • UPPS dan Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah
----	---	---

		<p>Palu perlu segera menindak lanjuti terkait bukti sah pelaksanaan proses penelitian dengan berkoordinasi dengan LPPM Unismuh Palu</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan Pimpinan Program Studi Ilmu administrasi Negara berkoordinasi dengan LPPM terkait Dokumen-dokumen Pedoman Penilaian, proses monev review proposal dan publikasi hasil penelitian. Selanjutnya Pimpinan Prodi Ilmu Administrasi Negara mensosialisasikan kepada DTSP Ilmu Administrasi Negara • UPPS dan Pimpinan Program Studi berkoordinasi dengan LPPM Renstra Penelitian, Road map penelitian dan pengadaan Kelompok Riset DTSP • Pimpinan Prodi Administrasi Negara segera mengadakan penambahan jumlah ketersediaan buku e-book/ hard copi dan prosiding. Pihak prdi dapat berlangganan minimal 3 jurnal terakreditasi/prodi • Pimpinan Prodi Administrasi Negara berkoordinasi dengan Wadep 2 segera melaksanakan survey kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana • UPPS dan Pimpinan Prodi Administrasi Nrgara melakukan koordinasi dengan LPPM sehubungan pelaksanaan pengelolaan penelitian, sistim seleksi penelitian internal, dan pelaporan penelitian yang periodic • UPPS dan Pimpinan Prodi Administrasi Negara perlu menyiapkan dokumen pengelolaan pendanaan dan mensosialisasikan kepada DTSP agar DTSP dapat mengetahui keseluruhan sumber2 dana penelitian): <ul style="list-style-type: none"> • menyiapkan survey kepuasan masyarakat(mitra) • melakukan sosialisasi tentang integrasi bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada DTSP • Mendorong DTSP agar menerbitkan artikel pengabdian di jurnal PKM dan jurnal terindeks scopus, serta menerbitkan HKI, hanya ada 1 HKI dalam 3 tahun terakhir di Prodi Administrasi Negara • Pimpinan Prodi Administrasi Negara perlu mengaktifkan pertemuan-pertemuan yang membahas tentang Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas PkM • Pimpinan Prodi Administrasi Negara berkoordinasi dengan LPPM terkait Panduan pelaksanaan abdimas dan SOP • Pimpinan Prodi administrasi Negara perlu: <ol style="list-style-type: none"> a. memperhatikan dokumen-dokumen PKM DTSP,
--	--	--

		<p>b. pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM perlu disertai dengan dokumen pendukung berupa surat tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Program Studi perlu kembali meninjau Road Map PKM Prodi Administrasi Negara, berkoordinasi dengan LPPM • Pimpinan Program studi perlu mendorong DTSP untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan PkM yang didanai oleh Dikti, atau Dikti Muhammadiyah atau pendanaan mandiri • Pimpinan Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan LPPM mengadakan dokumen penilaian PKM, pelaksanaan Monev PKM, Proposal dan Hasil PkM direview dan diseminarkan, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat peserta program • Pimpinan Prodi Administrasi Negara berkoordinasi dengan UPPS untuk mengadakan pertemuan/workshop dengan DTSP terkait Road Map PKM. Yang harus dimiliki oleh setiap dosen • Pimpinan Prodi Administrasi Negara perlu berkoordinasi dengan UPPS sehubungan dengan pengadaan kelompok Riset Prodi yang selanjutnya kelompok Riset dibentuk oleh LPPM) • Pimpinan Prodi Administrasi Negara perlu meningkatkan jumlah program pengabdian kepada masyarakat per prodi per tahun • Pimpinan Prodi Administrasi) Negara perlu berkoordinasi dengan UPPS terkait pengadaan Laboratorium Riset • Pimpinan Prodi Administrasi Negaraberkoordinasi dengan UPPS sehubungan dengan kurangnya jumlah buku E-book atau hard copi. Dan perlunya pengadaan ketersediaan jurnal terakreditasi nasional maupun internasional termasuk E-journal • Pimpinan Prodi Administrasi Negara perlu berkoordinasi dengan LPPM terkait dengan Renstra PKM, demikian pula ketersediaan Dokumen-dokumen / laporan-laporan Monev dan Diseminasi PKM • Pimpinan Prodi Administrasi Negara perlu mengajukan besar dana pengabdian per dosen pertahun ke UPPS sehubungan dengan ketersediaan dana PKM internal bagi dosen
--	--	--

12	Sosiologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Program Studi melakukan analisis Pemenuhan CPL, guna mengukur tingkat keserbacukupan, kedalaman dan kemanfaatan, sehingga CPL bisa ditingkatkan secara periodik dan konsisten; • Pimpinan Program Studi menyiapkan dokumen tentang academic excellence, guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang daya tarik Program Studi Sosiologi, kinerja dosen maupun kualitas lulusan; • Pimpinan Program Studi Sosiologi perlu mencari solusi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pendamping ijazah untuk meningkatkan kualitas lulusan • Pimpinan Program studi perlu mendorong mahasiswanya untuk mengikuti program MBKM, sebagai bukti prestasi mahasiswa; • Pimpinan Program Studi perlu melakukan tracer study untuk mengukur waktu tunggu lulusan, kesesuaian pekerjaan dengan visi keilmuan program studi, tingkat kepuasan pengguna lulusan, dll, informasi sangat penting guna meningkatkan akreditasi prodi. • Pimpinan Program Studi perlu membuat pertemuan dan mendorong DTSPS untuk meningkatkan presentasi integrasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian ke dalam pembelajaran • Pimpinan Program Studi perlu meningkatkan jumlah matakuliah yang menerapkan case study/project based learning sebagai bobot evaluasi untuk meningkatkan kompetensi lulusan. • Pimpinan Program Studi perlu meningkatkan pemenuhan proses pembelajaran terkait penelitian. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian yaitu (1) hasil penelitian harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) isi penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian serta capaian pembelajaran, (3) proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan,(4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif,akuntabel dan transparan • Pimpinan Program Studi perlu menyiapkan dokumen-dokumen terkait sistim pembelajaran dan pemantauan proses pembelajaran
----	------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Program studi telah melaksanakan penilaian pembelajaran namun perlu meningkatkan unsur penilaian dengan memakai 6 unsur penilaian untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penilaian; Bukti-bukti shahih berupa dokumen-dokumen pendukung wajib dimiliki • Pimpinan Program Studi wajib menyiapkan bukti-bukti sah terkait unsur penilaian perlu mengintegrasikan 4 unsur penilaian; • Pimpinan Program Studi perlu memiliki bukti sah terkait Setiap Soal Ujian sebaiknya sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review. • Pimpinan Program Studi sangat perlu melakukan Monev evaluasi kinerja dosen untuk mengetahui persentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap dosen, demikian pula penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan Dokumen-dokumen Evaluasi Kinerja Dosen dan Tendik merupakan bagian dari kerja unit penjaminan mutu, sehingga ketersediaan Unit Penjaminan Mutu harus segera diadakan • Pimpinan Program Studi perlu mengadakan dokumen formal kebijakan suasana akademik. Dokumen ini mencakup : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik • Pimpinan program studi perlu berkoordinasi dengan UPPS dalam menyiapkan dokumen-dokumen tentang sistim dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran • Pimpinan Program Studi perlu berkoordinasi dengan UPPS untuk membuat Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian DTSP • Pimpinan Program Studi perlu membuat pertemuan-pertemuan secara berkala terkait peningkatan kapasitas terhadap aspek hilirisasi hasil penelitian. • Pimpinan Program Studi Sosiologi perlu mengaktifkan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan pihak luar, membentuk unit bisnis dan sehubungan dengan penelitian-penelitian eksternal sangat terkait dengan peningkatan keaktifan dosen dalam melakukan penelitian • UPPS dan Pimpinan Program Studi perlu memfasilitasi DTSP mengikuti kegiatan-kegiatan workshop terkait penelitian. Dan mendorong para DTSP untuk selalu aktif melaksanakan penelitian
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Program Studi perlu berkoordinasi dengan LPPM terkait pendanaan eksternal universitas, untuk membantu peningkatan minat penelitian DTSPS Prodi Sosiologi • UPPS perlu mengadakan pertemuan terkait pembentukan kelompok Riset di tingkat fakultas dan Prodi dan mengkoordinasikan dengan LP2M • Pimpinan Program Studi berkoordinasi dengan UPPS untuk membuat Jurnal yang dikelola oleh Prodi Sosiologi, sendiri dan melakukan peningkatan SDM pengelola jurnal dengan melakukan workshop dan pelatihan terkait pengelolaan jurnal • UPPS dan Pimpinan Prodi, perlu membahas Standard hasil PkM antara lain <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan survey kepuasan masyarakat (mitra) b. Melakukan sosialisasi tentang integrasi bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada DTSPS c. Mendorong DTSPS agar menerbitkan artikel pengabdian di jurnal PKM dan jurnal terindeks scopus, d. Mendorong DTSPS Prodi Sosiologi menerbitkan HKI, • Pimpinan Program Studi perlu mendorong DTSPS dalam pelaksanaan kegiatan PkM. Diperlukan kerjasama antar disiplin ilmu, sehingga DTSPS perlu bekerjasama dengan disiplin ilmu lain • Pimpinan Program Studi perlu berkoordinasi dengan LP2M terkait Dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang sesuai dengan Panduan dan SOP • Pimpinan Program Studi perlu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung kegiatan PkM antara lain proposal pengabdian, surat-surat tugas DTSPS, surat tugas mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM dosen • Pimpinan Program Studi wajib menyiapkan roadmap PkM. Road map tersebut telah dikonsultasikan dengan LPPM • Pimpinan Program Studi berkoordinasi dengan UPPS dan LPPM mengadakan dokumen penilaian PKM, pelaksanaan Monev PKM, Proposal dan Hasil PkM direview dan diseminarkan, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat peserta program • Pimpinan Prodi Sosiologi berkoordinasi dengan UPPS untuk melakukan upaya-upaya peningkatan
--	---

		<p>agar DTSPS Prodi Sosiologi mampu meningkatkan dalam bidang PkM):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Prodi Administrasi Negara berkoordinasi dengan UPPS untuk mengadakan pertemuan/workshop dengan DTSPS terkait Road Map PKM. Yang harus dimiliki oleh setiap dosen • Pimpinan Prodi Administrasi Negara perlu berkoordinasi dengan UPPS sehubungan dengan pengadaan kelompok Riset Prodi yang selanjutnya kelompok Riset dibentuk oleh LPPM • Pimpinan Program Studi Sosiologi perlu mengingatkan DTSPS untuk melengkapi Laporan PkM dengan surat tugas yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM • Pimpinan Program Studi perlu melakukan peningkatan keterlibatan PkM DTSPS dengan dosen prodi lain, • Pimpinan Program Studi perlu mengusahakan Laboratorium Riset sebagai bentuk pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana prodi • Prodi perlu menambah jumlah koleksi E-book atau buku dalam bentuk fotocopi agar tercapai ketersediaan buku yang sesuai Standard yang lebih baik • Pimpinan Program Studi wajib berperan aktif dan berkoordinasi dengan LPPM terkait Dokumen-dokumen penting antara lain RENSTRA (Rencana Strategis) PkM, Pedoman Pengelolaan Pengabdian, Dokumen Seleksi PkM tersedia di LPPM. Dokumen-dokumen tersebut tersedia di LP2M • Pimpinan Program Studi wajib memiliki laporan-laporan PKM DTSPS dan mendokumentasikan dengan baik. • Pimpinan Program Studi perlu melakukan Monev kegiatan PkM dan diseminasi hasil PkM dilaksanakan oleh LPPM. Walaupun demikian Prodi Sosiologi perlu menyimpan/mendokumentasikan dokumen-dokumen terkait Monev dan Diseminasi DTSPS • Pimpinan Prodi Sosiologi perlu mengajukan besaran dana pengabdian per dosen pertahun ke UPPS sehubungan dengan ketersediaan dana PKM internal bagi dosen): • Pimpinan Prodi Sosiologi perlu menginformasikan kepada DTSPS pendanaan PKM dari berbagai sumber dana (Dikti, RisetMu, Rispro., LIPI, Brin)
--	--	---

13	Teknik Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • PPS melakuakn peninjauan Kurikulum 3 tahun sekali • Dalam melakukan analisis pemenuhan CPL menggunakan metode Shahih dan relevan yang mencakup : Kecerbucukupan, Kedalaman dan Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dalam peningkatan CPL selama 3 tahun terakhir.
14	Teknik Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi harus memastikan bahwa dokumen kurikulum yang diimplementasikan adalah yang telah disahkan oleh pimpinan. Selain itu, Prodi dalam melakukan pemenuhan CPL harus menggunakan metode yang sah dan relevan. Peninjauan CPL Prodi idealnya dilakukan sekali dalam setahun untuk memantau dan mengupdate kebutuhan pasar.
15	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan Program Studi membentuk Unit Penjaminan Mutu di tingkat fakultas bahkan pada level program studi guna berkoordinasi dengan LPM dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mutu di tingkat fakultas dan prodi. Pembentukan Unit Penjaminan Mutu ini direncanakan terlaksana paling lambat satu semester. • UPPS mengajukan calon ketua Program Studi pada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Kepegawaian dan Keuangan • Mengacu pada amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020, terkait kampus merdeka, Program Studi perlu melakukan sosialisasi implementasi MBKM • UPPS dan Program Studi mensosialisasikan pada dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian atau PkM ke dalam pembelajaran. • Menyesuaikan dokumen RPS dengan Standar dan jumlah mata kuliah yang tersedia • UPPS mengajukan kebutuhan tenaga kepastakaan dan tenaga laboran yang bersertifikasi kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Kepegawaian • UPPS mengajukan kebutuhan infocus kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Kepegawaian. • UPPS dan Program Studi mengajukan kebutuhan dana internal untuk penelitian dan PkM Dosen kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Kepegawaian • Prodi memfasilitasi dosen-dosen untuk peningkatan bahan ajar dan teks book. • Prodi mendorong dosen-dosen untuk melaksanakan

		<p>publikasi jurnal penelitian dan penerbitan HKI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi membuat rencana strategis penelitian agar dosen-dosen didalam melaksanakan penelitian lebih terarah. • Prodi mendorong DTSPS untuk melaksanakan penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan iptek yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha atau industri serta penelitian lintas ilmu.. • Memaksimalkan kinerja Unit Penjaminan Mutu tingkat Fakultas agar monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dapat terlaksana dengan baik. • Prodi memfasilitasi mengadakan workshop terkait Roadmap penelitian kepada DTSPS • Prodi memfasilitasi pembuatan panduan penelitian dan mengsosialisasikannya kepada dosen-dosen • Mendorong dosen-dosen untuk memiliki roadmap penelitian dan memfasilitasi melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian • Melaksanakan pengusulan tenaga kepastakawan sehingga informasi terkait fasilitas perpustakaan, jurnal dan ebook dapat diketahui jumlahnya dan dimanfaatkan didalam kegiatan penelitian • Mendorong DTSPS untuk melakukan PKM teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga terintegrasi dengan pembelajaran • Mengadakan workshop terkait pembuatan roadmap PKM, dan mendorong dosen-dosen membuat HKI pengabdian serta publikasi scopus minimal 3 tahun sekali bagi setiap dosen. • Mengadakan sosialisasi dan workshop terkait panduan PKM dan roadmap PKM • Mendorong DTSPS dalam pengusulan PkM untuk mendapatkan pendanaan pengabdian internal.
16	Agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS didukung Pimpinan Program Studi membentuk Unit Penjaminan Mutu di tingkat fakultas (jika memungkinkan sampai pada tingkat program studi – Gugus Penjaminan Mutu). Unit ini yang kemudian akan berkoordinasi dengan pimpinan UPPS dan LPM dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mutu di tingkat fakultas dan prodi.. • Pimpinan Program Studi memperbaiki dokumen kurikulum dan melakukan peninjauan kurikulum setiap tahun dan revisi kurikulum maksimal empat tahun sekali yang melibatkan tim ahli, stakeholder internal dan eksternal dan mendokumentasikannya

		<p>dengan baik di prodi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Program Studi melalui rapat distribusi mata kuliah, menyampaikan kepada dosen pengampu MK untuk memperbaharui RPS di setiap semester. • Pimpinan Program Studi mengumpulkan RPS dari dosen pengampu mata kuliah paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai. • Pimpinan program studi menyeleksi hasil percobaan, laporan PKL dan skripsi mahasiswa yang berpotensi memperoleh paten dan memfasilitasi pendaftaran paten melalui LPPM • Pimpinan Program Studi melalui rapat-rapat evaluasi atau distribusi mata kuliah menyampaikan agar dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu sumber ajar yang terkait dengan mata kuliah masing-masing • Pimpinan Program Studi memetakan kerjasama internasional yang bisa direalisasikan dalam bentuk kegiatan kemudian mendokumentasikan laporan kegiatan kerjasama yang telah terlaksana • Pimpinan Program Studi bersama UPM/GPM yang terbentuk memantau proses perkuliahan setiap minggu agar kesesuaian RPS dan praktek pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. . • Pimpinan Program Studi menyampaikan kepada semua dosen pengampu MK untuk mmemberi akses RPS kepada mahasiswa yang juga bisa menjadi kontrol kesesuaian proses pembelajaran dengan dokumen RPS tersebut. • Pimpinan Program Studi mensosialisasikan Format Kontrak Perkuliahan yang bisa digunakan oleh dosen untuk melakukan kesepakatan penilaian yang terdokumentasi dengan baik (Kontrak perkuliahan diserahkan ke Prodi pada minggu ke-dua perkuliahan) • UPPS dan Pimpinan Program Studi memetakan kompetensi dosen dan kebutuhan dosen program studi agar setiap dosen memiliki latar belakang yang sesuai. • Pimpinan Program Studi mengurangi keterlibatan dosen LB dalam penjadwalan setiap semester hingga maksimal 10% dari total jumlah dosen yang terlibat. • UPPS dan Pimpinan program studi memetakan kebutuhan tendik dan mengajukannya ke tingkat universitas.
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS merekomendasikan/mengirim Tendik dalam kegiatan pengembangan keterampilan dan kompetensi baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. • Pimpinan Program Studi memotivasi dosen agar dapat memaksimalkan penggunaan Spada agar dosen bisa mendokumentasikan semua bahan ajar dan proses pembelajaran di Spada. • UPPS, Pegawai Perpustakaan, dan Pimpinan Program Studi melakukan pendataan lengkap sumber pustaka sesuai dengan program studi, menambah sumber pustaka dengan memaksimalkan mengunduh jurnal-jurnal bereputasi yang dapat diakses secara bebas. • Pimpinan Program Studi mendata jurnal-jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi yang terkait dengan bidang keilmuan prodi dan menjadikan jurnal-jurnal tersebut bahan pustakan yang tersedia di perpustakaan sebagai referensi ajar dan penelitian dosen dan mahasiswa • Pimpinan Program Studi didukung UPPS dan bekerja sama dengan Prodi lain menyusun Panduan Bimbingan Akademik dan Panduan Pengembangan Suasana akademik. • Pimpinan Program Studi mensosialisasikan Tupoksi Dosen PA sebagai pengarah dan pembimbing mahasiswa dalam hal akademik (jika memungkinkan juga non-akademik yang memberi pengaruh pada pencapaian akademik mahasiswa). • Pimpinan Program Studi menyediakan kartu bimbingan akademik dan mengaktifkan kembali penggunaan kartu kontrol bimbingan skripsi sehingga frekuensi bimbingan mahasiswa dapat dipantau dan terdokumentasi dengan baik.. • Pimpinan Program Studi menjembatani pembentukan Himpunan Mahasiswa di tingkat prodi. • Pimpinan Program Studi melakukan pemetaan kebutuhan-kebutuhan prodi sehingga perencanaan pembiayaan prodi dilakukan lebih awal paling lambat dua bulan sebelum jadwal Rapat Kerja tahunan sehingga kegiatan akademik dan non-akademik di tingkat prodi terdata dan terencana dengan seksama yang menjadi bukti adanya budaya mutu. • UPPS dan Pimpinan Program Studi mempertimbangkan adanya alokasi dana kegiatan
--	--

		<p>penelitian dan pengabdian sehingga dapat memacu kinerja dosen dalam hal penelitian dan pengabdian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Program Studi Prodi melakukan upaya agar artikel DTSPS dapat terbit di Jurnal terakreditasi Sinta. • Pimpinan Program Studi Prodi mengupayakan agar jurnal yang telah dimiliki program studi saat ini aktif dan dapat mengajukan proses akreditasi. • Prodi memantau/ mengingatkan dosen melalui rapat evaluasi/rapat-raat program studi untuk selalu memperbaharui Google Scholar dan Sinta. • UPPS dan Pimpinan Program Studi melaksanakan workshop penyusunan Roadmap Penelitian yang mengacu pada road map penelitian universitas, diturunkan ke fakultas, program studi hingga pada dosen program studi masing-masing. • Pimpinan Program Studi, melalui rapat program studi, menyampaikan pentingnya pelaksanaan kegiatan PkM secara melembaga sehingga kegiatan terdokumentasi dengan baik. • Pimpinan Program Studi menjembatani Dosen dengan LPPM agar semua kegiatan PkM dapat terlaksana dan tercatat dengan baik. • UPPS bersama Pimpinan Program Studi berkonsultasi dengan LPPM terkait penyusunan Roadmap (Peta jalan) PkM Fakultas, Prodi dan Dosen bersesuaian dengan Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat universitas.
17	Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS dan Program Studi segera mengesahkan Unit Penjaminan Mutu di tingkat fakultas (jika memungkinkan sampai pada tingkat program studi – Gugus Penjaminan Mutu). Unit ini yang kemudian akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan LPM dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mutu di tingkat fakultas dan prodi. Pembentukan Unit Penjaminan Mutu ini direncanakan terlaksana paling lambat satu semester.. • Pimpinan Program Studi memperbaiki dokumen kurikulum dan melakukan peninjauan kurikulum setiap tahun serta revisi kurikulum maksimal empat tahun sekali yang pelaksanaannya melibatkan unsur Stakeholder Internal dan Eksternal. Pelaksanaan peninjauan kurikulum ataupun workshop revisi kurikulum harus terdokumentasi dengan baik mulai dari Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, foto kegiatan, laporan, dan dokumen kurikulum yang

		<p>telah direvisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Program Studi melalui rapat distribusi mata kuliah mensosialisasikan format RPS yang berlaku di universitas kepada seluruh dosen program studi dan menyampaikan kepada dosen pengampu MK untuk memperbaharui RPS di setiap semester secara rutin termasuk memasukkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan Mata Kuliah yang diampu sebagai salah satu sumber ajar. • Pimpinan Program Studi mengumpulkan RPS dari dosen pengampu mata kuliah paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai. • Unit Penjaminan Mutu yang baru dibentuk beserta pimpinan program studi melaksanakan Tracer Study Pengguna Lulusan dan Tracer Study lulusan secara berkala dan dianalisis serta dilaporkan sehingga hasilnya terdokumentasi dengan baik. • Pimpinan Program Studi memetakan kerjasama internasional yang bisa direalisasikan dalam bentuk kegiatan. • Pimpinan Program Studi mendokumentasikan laporan kegiatan kerjasama yang telah terlaksana. • Pimpinan Program Studi mensosialisasikan Format Kontrak Perkuliahan yang bisa digunakan oleh dosen untuk melakukan kesepakatan penilaian yang terdokumentasi dengan baik (Kontrak perkuliahan diserahkan ke Prodi pada minggu ke-dua perkuliahan) • Pimpinan Program Studi mesosialisasikan format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disepakati di tingkat universitas (Mencantumkan rubrik penilaian, teknik penilaian, dan instrumen penilaian). • UPPS dan Pimpinan Program Studi memetakan Jafung dosen dan memfasilitasi kenaikan Jabatan Fungsional Dosen. • Pimpinan Program Studi mengajukan kebutuhan akan tenaga pustakawan yang ditindaklanjuti oleh UPPS untuk diajukan di tingkat universitas dengan mengutamakan calon pustakawan yang memiliki latar belakang perpustakaan (Ijazah S1). • Pimpinan Program Studi mendata Jurnal Nasional terakreditasi dan Jurnal Internasional bereputasi yang bisa dijadikan bahan pustaka online dan offline (Softcopy dan hardcopy), sekurang-kurangnya 2
--	--	--

		<p>jurnal untuk level internasional dan 3 jurnal untuk level nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Program Studi didukung UPPS dan bekerja sama dengan Prodi lain menyusun Panduan Bimbingan Akademik dan Panduan Pengembangan Suasana akademik dan mengesahkan Panduan Pembimbingan Tugas Akhir sebelum diedarkan. • Pimpinan Program Studi mensosialisasikan Tupoksi Dosen PA sebagai pengarah dan pembimbing mahasiswa dalam hal akademik (jika memungkinkan juga non-akademik yang memberi pengaruh pada pencapaian akademik mahasiswa), tidak hanya sekadar menandatangani KRS dan KHS mahasiswa saja. • Pimpinan Program Studi menyediakan kartu bimbingan akademik dan kartu kontrol bimbingan skripsi yang dijadikan syarat administrasi ujian proposal agar Kartu Kontrol kembali ke prodi dan kegiatan pembimbingan baik Dosen PA dan Dosen Pembimbing Skripsi dapat terdokumentasi dengan baik. • Pimpinan Program Studi menjembatani pembentukan Himpunan Mahasiswa di tingkat prodi. • Pimpinan Program Studi menyusun Rencana Anggaran Belanja paling lambat dua bulan sebelum jadwal Rapat Kerja tahunan sehingga kegiatan akademik dan non-akademik di tingkat prodi terdata dan terencana dengan seksama yang menjadi bukti adanya budaya mutu. • Pimpinan Program Studi memetakan DTSP yang belum memiliki akun Google Scholar dan SINTA serta memfasilitasi pembuatannya dan mendorong agar dosen aktif melaksanakan penelitian dan memperbaharui informasi yang ada di akun masing-masing. • Pimpinan Program Studi mendorong serta memfasilitasi dosen-dosen dalam peningkatan bahan ajar dan penerbitan teks book sehingga dapat menambah rujukan pustaka dan juga dimanfaatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat • Pimpinan Program Studi mendorong dosen tetap program studi agar menerbitkan HKI atau Paten dan hasil penelitian yang diperoleh dan bernilai inovasi sehingga memberi nilai tambah untuk dosen serta menjadi referensi dan pustaka prodi.
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Program studi perlu menyusun panduan penelitian ataupun mensosialisasikan panduan yang telah ada ke dosen-dosen prodi dan serta mendorong DTSP untuk membuat Roadmap Penelitian sesuai bidang keilmuannya. • Pimpinan Program Studi melakukan workshop roadmap pengabdian dengan menghadirkan ahli pakar di bidangnya. • Pimpinan Program Studi dan UPPS memaksimalkan kinerja Unit Penjaminan Mutu tingkat Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu Tingkat Prodi agar monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dapat terlaksana dengan baik. • Pimpinan Program Studi memastikan bahwa setiap PkM yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang menjadi materi dalam bahan ajar. • Pimpinan Program Studi Pimpinan memotivasi dosen agar dapat melaksanakan PkM multi disiplin sekurang-kurangnya satu kali setahun. • Pimpinan Fakultas dan program studi memfasilitasi para dosen melalui kerjasama dengan pihak luar negeri sehingga dosen bisa melakukan kegiatan pada level internasional dalam bentuk Joint Community Service. • Pimpinan Program Studi, melalui rapat program studi, menyampaikan pentingnya pelaksanaan kegiatan PkM secara melembaga sehingga kegiatan terdokumentasi dengan baik. • Pimpinan Program Studi menjembatani Dosen dengan LPPM agar semua kegiatan PkM dapat terlaksana dan tercatat dengan baik. • UPPS bersama Pimpinan Program Studi berkonsultasi dengan LPPM terkait penyusunan Roadmap (Peta jalan) PkM Fakultas, Prodi dan Dosen bersesuaian dengan Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat universitas. • Pimpinan Program Studi di bawah pengawasn Wakil Dekan bidang akademik dan kerjasama melakukan review proposal PkM dan mengingatkan dosen agar melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM Dosen dan hal tersebut didokumentasikan dalam bentuk kontrak kerja mahasiswa dan ditandatangani.
--	--

18	Kesmas	<ul style="list-style-type: none"> • Program Studi memperbaiki dokumen kurikulum dan melakukan peninjauan kurikulum setiap tahun dan revisi kurikulum maksimal empat tahun sekali serta menyesuaikan capaian pembelajaran dengan Visi Misi program studi. • program studi pada saat meninjau kurikulum perlu menyusun komposisi mata kuliah yang meliputi 155 mata kuliah perguruan tinggi, 15% Mata kuliah Fakultas dan 70% mata kuliah program studi, serta tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajarannya dirumuskan sesuai dengan deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI • Program Studi telah memiliki dokumen kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU) tetapi tidak ada kegiatan kerjasama yang terdokumentasi/terlaksana (tidak ada laporan kegiatan kerjasama) hanya saja Program studi baru memiliki satu Kerjasama internasional • Metode Pembelajaran yang dilaksanakan yaitu case metode serta ceramah • Pimpinan Program Studi mensosialisasikan Format Kontrak Perkuliahan yang bisa digunakan oleh dosen untuk melakukan kesepakatan penilaian yang terdokumentasi dengan baik (Kontrak perkuliahan diserahkan ke Prodi pada minggu ke-dua perkuliahan) • Pimpinan Program Studi berkoordinasi aktif dengan operator SIMAK agar semua mahasiswa dapat memasukkan KRS sebelum perkuliahan dimulai sehingga hasil capaian belajar di akhir semester dapat diunggah oleh dosen/Prodi/operator dan dapat diakses oleh mahasiswa. • UPPS/PPS perlu menyampaikan hasil yudisium dengan menggunakan sistem online agar lebih terpublikasi. • UPPS/PPS perlumenyediakan ruang perpustakaan yang layak bagi mahasiswa • UPPS/PPS perlu menyediakan ruang pelayanan kesehatan. • UPPS/PPS perlu menyediakan ruang kerja per dosen. • UPPS/PPS perlu menyediakan jurnal internasional bereputasi • UPPS/PPS perlu menyediakan sistem informasi untuk e-library dan e-repository. • UPPS/PPS perlumenyediakan akses mahasiswa berkebutuhan khusus.
----	---------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • UPM perlu membuat laporan hasil kepuasan. • UPM perlu melaksanakan audit sarana dan prasarana • UPM perlu membuat laporan survey kepuasan. • UPPS/PPS perlu melakukan kegiatan yang meningkatkan daya tarik untuk kunjungan (TKj) e-library perpustakaan mahasiswa dan dosen • UPPS/PPS perlu sosialisasi kepada DTSP untuk melakukan survey pelaksana PKM yang kemudian dibuatkan laporan hasil survey • UPPS/PPS perlu sosialisasi kepada DTSP agar mengintegrasikan PKM dalam Pembelajaran (Bahan ajar) • PPS/PPS perlu memacu DTSP untuk menerapkan HKI di masyarakat • PPS/PPS perlu memacu DTSP untuk mempublikasikan PKM ke jurnal terindeks Scopus • UPPS/PPS perlu memotivasi DTSP untuk melakukan publikasi serta meng HKI PkM • UPPS/PPS perlu meningkatkan dan memfasilitasi dalam kegiatan PkM • UPPS/PPS perlu menyiapkan dokumen panduan pelaksanaan PkM dan mendiseminasikan alur pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kepada dosen • UPP/PPS perlu membuat roadmap PkM dan mendiseminasikannya ke dosen dan selanjutnya setiap dosen membuat roadmap PkMnya masing-masing. • UPPS/PPS perlu menyiapkan dokumen panduan pelaksanaan PkM dan mendiseminasikan alur pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kepada dosen. • UPPS/PPS perlu melakukan kerjasama dengan LPPM untuk mereview Proposal dan hasil PkM agar memenuhi persyaratan yang sesuai dengan pedoman, serta melaksanakan atau mengikuti diseminasi PkM yang diselenggarakan. • UPPS/PPS perlu mensosialisasikan ke dosen-dosen agar membuat roadmap PkM yang kemudian menjadi acuan dalam melakukan kegiatan PkM • UPPS/PPS perlu berkoordinasi dengan LPPM untuk membuat kelompok riset • PPS perlu mensosialisasikan kepada para Dosen pengabdian agar melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkMnya yang dibuktikan dengan surat
--	---

		<p>tugas dan foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPPS/PPS perlu menambah Judul buiku/e-book serta memacu dosen-dosen agar mempublikasikan hasil-hasil PkM dalam jurnal terakreditasi • UPPS/PPS perlu melakukan koordinasi ke LPPM untuk pelaksanaan mpnev dan diseminasi hasil PkM dengan melibatkan reviewer internal maupun eksternal • Dokumen pengelolaan penelitian diperlukan agar dosen mengetahui proses dalam melakukan penelitian • Program Studi memperbaiki dokumen kurikulum dan menyesuaikan dengan kurikulum KPT-OBE dan melakukan peninjauan kurikulum setiap tahun dan revisi kurikulum maksimal empat tahun sekali. Struktur Mata Kuliah Prodi akan memuat Mata Kuliah universitas yang telah disepakati yakni: MK. Kebencanaan, MK. Kewirausahaan Islami, MK. Pendidikan Anti Korupsi. • Pimpinan Program Studi melalui rapat distribusi mata kuliah, menyampaikan kepada dosen pengamppu MK untuk memperbaharui RPS di setiap semester. • Pimpinan Program Studi mengumpulkan RPS dari dosen pengampu mata kuliah paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai. • Kedepannya 30% jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional, Jumlah buku yang dirujuk (Terbitan 5 tahun terakhir), Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary), Isi/tema penelitian mengantisipasi permasalahan global, Isi/ tema penelitian dilakukan join riset dengan mitra LN, dicantumkan pada isi penelitian • 70% dicantumkan jumlah penelitian yang sesuai dengan rencana strategis penelitian dan Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan iptek yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha atau industry • Minimal 25% kedepannya Buku ajar, buku teks, rerata unit bisnis atau setara hasil riset per prodi per tahun dan kontrak kerja dengan pihak ke tiga per prodi per tahun, dicantumkan dalam hasil penelitian • kedepannya minimal 50% dosen menghasilkan HAKI dari hasil penelitian.LAMPTKES Kriteria 7.1. Kegiatan Penelitian yang sesuai dengan roadmap visi
--	--	---

		<p>keilmuan dan lingkup penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Laboratorium, menunjang kegiatan penelitian dan dapat meningkatkan Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana prasarana • Penyediaan dokumen Renstra penelitian yang memuat roadmap penelitian, SOP penelitian dengan penyediaan dana sharing penelitian, agar dosen dalam melakukan penelitian lebih terarah sesuai dengan roadmap penelitian
19	Ilmu Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Disiapkan dokumen laporan tentang proses perubahan kurikulum dari KKNi ke KPT-OBE Integrasi MBKM. • Pelaksanaan Tracer Study haruslah sistemik agar dapat mengetahui kondisi alumni. • Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dari Prodi sampai fakultas • Dimasa akan datang perlunya perencanaan persiapan menuju akreditasi internasional • Monitoring dan evaluasi lebih ditingkatkan oleh Ketua Program Studi khususnya menyangkut RPS • Haruslah memiliki Standar penilaian pembelajaran yang mengacu pada ketentuan penilaian • Mendorong DTSP agar lebih terlibat di lingkungan internasional • Mendorong dosen memiliki skor TOEFL minimal 500 (TOEFL₅₀₀) • Meningkatkan monitoring dan evaluasi survey kepuasan mahasiswa terhadap kinerja Dosen (KMKD) • Meningkatkan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan (KMLTK) • Perencanaan atas ketersediaan ruang pelayanan kesehatan fakultas • Peningkatan perpustakaan dengan memberikan pelayanan mahasiswa yang berkebutuhan khusus • Peningkatan monitoring dan evaluasi tentang survey Indek kepuasan civitas akademika (IKCA) terhadap layanan sarana dan prasarana • Peningkatan monitoring dan evaluasi tentang proses audit sarana dan prasarana pembelajaran • Peningkatan monitoring dan evaluasi tentang keterlaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran. • Peningkatan monitoring dan evaluasi dari Ketua

		<p>Program Studi tentang keterlaksanaan pembimbingan akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan pihak universitas tentang pedoman dan implemetasi penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal. • Fakultas memfasilitasi Prodi untuk mengikutkan DTSPS pada Seminar Nasional dan internasional sebagai pemakalah. • Melaksanakan kerjasama dalam bidang penelitian atau membangun konsorsium penelitian dengan Fakultas Hukum Universitas • Membuat Road Map Penelitian berdasarkan Road Map Penelitian LP2M Unismuh Palu • Berkoordinasi dengan LP2M Unismuh Palu terkait Pengadaan Pedoman-pedoman Penelitian dan Dokumen lainnya • Fakultas mengadakan Workshop terkait Road Map dan Pembentukan Kelompok Riset • Melakukan upaya-upaya terkait ketersediaan jurnal dan E-journal di Fakultas/Prodi • Harus ada survey kepuasan terhadap pelaksanaan PkM, guna mendapatkan feedback (tingkat kepuasan) dari masyarakat terhadap pelaksanaan PkM • Wadek I dan Prodi harus mendorong dosen untuk memasukkan hasil PkM kedalam bahan ajar matakuliahnya • Wadek I dan Prodi harus mendorong dosen untuk mempublikasikan hasil PkM di Jurnal Internasional • Harus ada kebijakan ditingkat Fakultas untuk mendorong dosen melakukan kegiatan penelitian dengan dosen dengan disiplin ilmu yang berbeda • Harus didorong dosen melakukan join PkM dengan mitra luar negeri • Wadek I dan Prodi harus menyusun road map PkM • Mahasiswa harus lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan PkM Dosen • Wadek I dan Program studi harus melakukan kegiatan MONEV PkM • Dokumentasi dan Pelaporan kegiatan PkM Dosen harus dibuat secara tertib dan berkesinambungan • Fakultas harus menyusun pedoman PkM • Pedoman PkM harus disosialisasi kepada dosen dan pihak yang berkepentingan
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Survey kepuasan terhadap ketercapaian PKM harus dilakukan secara kontinyu • Harus didorong kegiatan PkM lintas prodi atau multi disiplin • Harus disusun Road Map kegiatan PkM • Harus dibentuk kelompok Riset di tingkat Prodi dan fakultas • Fakultas harus mendorong program studi untuk berlangganan jurnal nasional terakreditasi • Fakultas harus mendorong program studi untuk berlangganan jurnal internasional • Fakultas harus melaksanakan kegiatan survey untuk mengukur kepuasan terhadap saptas PkM
--	--	---

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dari hasil Audit Mutu Internal maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya kegiatan Audit Mutu Internal program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu telah dilakukan dengan baik pada tanggal 26 September s/d 26 Oktober 2022 dengan melibatkan 15 Auditor ke 19 Program Studi.
2. Ruang lingkup audit meliputi Standar pendidikan, Standar penelitian dan Standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Dari hasil audit terhadap Program Studi didapatkan beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan mutu program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu
4. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal seperti, waktu yang ditentukan (jam) terkadang tidak sinkron, ketidaksiapan Program Studi dalam menunjukkan dokumen.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan maka terdapat beberapa hal direkomendasikan kepada program studi untuk segera menindaklanjuti temuan yang didapatkan pada kegiatan audit dengan penuh tanggung jawab.

1. Perlunya pembentukan Gugus Penjaminan Mutu tingkat fakultas
2. Sosialisasi atas Standar mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Palu lebih ditingkatkan kepada Civitas Akademik
3. Responsifitas fakultas terutama Program Studi dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal lebih ditingkatkan
4. Melaksanakan Rencana Tindakan Manajemen (RTM) tingkat fakultas guna menyikapi berbagai temuan dari hasil Audit Mutu Internal
5. Program studi dengan dipimpin oleh ketua Prodi segera berkoordinasi dengan lembaga/unit Program terkait yang dapat membantu menyelesaikan temuan.

SURAT TUGAS

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU**
(UNISMUH PALU)
Jl. Hidayatullah Palu, 71114 Palu, Palu, Indonesia | 401002 Palu 083136

SURAT TUGAS
Nomor : 499/14/II.3.UMP/TGS/IX/2022

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan memohon ridha Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu, dengan ini menugaskan kepada nama tersebut dibawah ini :

1. Sudirman, SKM., M.Kes.
2. Muhammad dasril, S.Sos., M.si.
3. Fikriani A Omolu, S.S., M.Hum., M.Pd.
4. Tiatha Ayu Paramitha, S.Hut., M.P.
5. Irmawaty, S.P., M.Si.
6. Andi Famrizal, S.Sos., M.Si.
7. Nursalim, S.Kom., M.Kom.
8. Moh. Nafri, S.H., M.H.
9. Nasrullah Akkas, S.E., M.M.
10. Rukhayati, S.E., M.M.
11. Dr. Ir. Rosmaniar Galica, M.Si.
12. Eka Prasetya Hati Baculu, S.Pd., M.P.H.
13. Sri Haryani, S.E., M.Ak.
14. Andi Mappewali, S.Pd., M.Pd.
15. Rahayu Prasetyaningsih, S.Pd., M.Pd.

Untuk melakukan Audit Mutu Internal di Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu Tahun Akademik 2021-2022 pada tanggal 26 September – 8 Oktober 2022.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sembari mengharap ridha Allah.

*Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu Alaikumi War.Wab.*

Palu, 23 Syafar 1444 H
19 September 2022 M


Prof. Dr. H. Rajendra, S.E., M.M.
NBM 844.792

Tembusan kepada yth.

1. Ketua BPH Unismuh di Palu;
2. Arsip

Program Studi HES



Program Studi AS



Program Studi PAI



Program Studi PIAUD



Program Studi PG-PAUD



Program Studi Bahasa Inggris



Program Studi Ilmu Hukum



Program Studi Manajemen



Program Studi PNF dan IKOR



Program Studi Teknik Sipil



Program Studi Ilmu Administrasi



Program Studi Ilmu Kesmas



Pascasarjana

